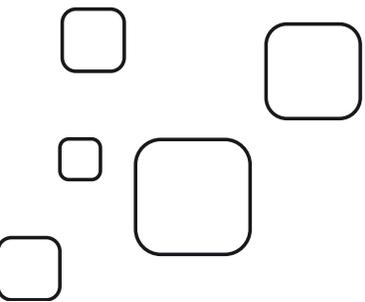




LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

TAHUN 2023

**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
ASET DAERAH KABUPATEN JOMBANG**





KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT., karena atas perkenaan-Nya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023, sebagai aplikasi dari Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2019 – 2023, walaupun penuh keterbatasan dan kekurangan namun dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas ini pada dasarnya merupakan amanat dari :

- a. Inpres Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dimana setiap instansi pemerintah sampai tingkat eselon II harus memiliki Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang didalamnya berisi program- program utama yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun;
- b. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/IX/6/8/2003, tentang Perbaikan pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Visi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang yang ditetapkan adalah **“BERSAMA MEWUJUDKAN JOMBANG YANG BERKARAKTER DAN BERDAYA SAING”**. Dengan misi, yaitu : **“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih dan Profesional”**.

Sebagai proses yang berkesinambungan dengan tahun sebelumnya, maka isi yang terkandung di dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini merupakan kebulatan kesepakatan bersama yang dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan secara bersama-sama pula oleh seluruh jajaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang. Kami sadar bahwa Laporan ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat konstruktif senantiasa kami nantikan untuk perbaikan atau penyempurnaan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini di tahun mendatang. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan bimbingan, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah



Kabupaten Jombang tahun 2023 ini dapat diselesaikan sesuai dengan target waktu yang diberikan.

Semoga Laporan ini bermanfaat khususnya bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang dalam upaya mewujudkan **Jombang yang Berkarakter dan Berdaya Saing**, juga bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Jombang, 2 Februari 2023

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGANDAN
ASET DAERAH KABUPATEN JOMBANG



MUHAMMAD NASHRULLOH, SE, M. Si.

Pembina Tingkat I

NIP. 19680202 199003 1 013



IKHTISAR EKSEKUTIF

Sebagaimana telah menjadi komitmen Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang selama tahun 2019 – 2023 ingin mewujudkan visi **“BERSAMA MEWUJUDKAN JOMBANG YANG BERKARAKTER DAN BERDAYA SAING”**. Visi ini dijabarkan ke dalam 1 (satu) misi, 1 (satu) tujuan dan 2 (dua) sasaran yang selanjutnya dituangkan ke dalam 3 (tiga) program.

Pada tahun 2023, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menetapkan 2 (dua) sasaran yang ingin diwujudkan / dicapai sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2019 – 2023 sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yaitu:

- a) Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- b) Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa rata-rata tingkat capaian kinerja dari 2 sasaran di atas adalah sebesar 100%. Hasil ini mencerminkan kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selama tahun 2023. Pencapaian Kinerja tersebut dilaksanakan melalui 3 program, 12 kegiatan, dan 66 sub kegiatan yang capaiannya bisa dilihat pada tabel berikut :

No.	SASARAN	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)	SKALA ORDINAL
1	2	4	8
1	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	100 %	Berhasil
2	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	100 %	Berhasil



Kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

1. Terdapat perubahan kebijakan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi yang menyebabkan bertambahnya program atau berubahnya pagu program ketika dokumen perencanaan dan penganggaran telah ditetapkan;
2. Keterbatasan Kemampuan keuangan daerah untuk mencukupi alokasi belanja wajib yang ditetapkan aturan perundang-undangan (mandatory spending).
3. Evaluasi Kinerja belum dilakukan secara maksimal.

Strategi pemecahan masalah / langkah-langkah yang telah dilaksanakan :

1. Dialokasikan pada program yang mendekati program yang ada Pemutakhiran Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah.
2. Memadukan kebijakan pemerintah daerah agar tujuan penetapan kebijakan dapat tercapai tapi minimal mandatory spending bisa dialokasikan.
3. Melakukan evaluasi secara rutin dan berkala setiap triwulan dengan melibatkan seluruh pegawai BPKAD



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... i

IKHTISAR EKSEKUTIFiii

DAFTAR ISI..... v

DAFTAR LAMPIRAN.....vi

BAB I PENDAHULUAN..... 1

 A. Latar Belakang 1

 B. Dasar Hukum..... 4

 C. Isu-isu Strategis 6

 D. Sistematika Laporan..... 7

BAB II PERENCANAAN KINERJA..... 9

 A. Rencana Strategis..... 9

 B. Rencana Kerja 13

 C. Indikator Kinerja Utama 18

 D. Perjanjian Kinerja..... 18

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....20

 A. Capaian Kinerja Organisasi.....20

 B. Realisasi Anggaran80

BAB IV PENUTUP 93

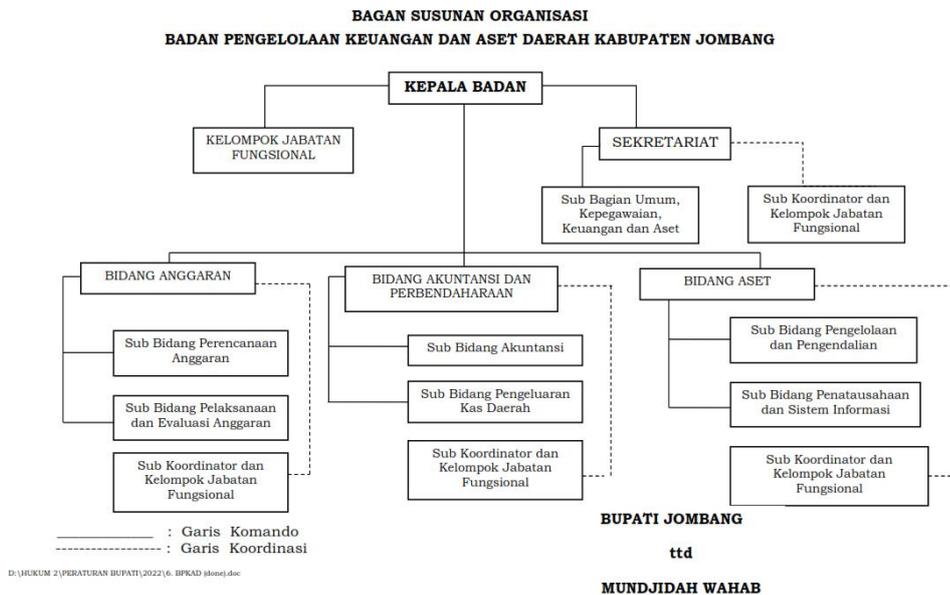


BAB I
PENDAHULUAN

A. STRUKTUR ORGANISASI

Sesuai dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 72 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang memiliki Tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah. Adapun struktur organisasi BPKAD adalah sebagai berikut :

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI JOMBANG
NOMOR : 72 TAHUN 2021
TANGGAL : 30 Desember 2021



B. TUGAS DAN FUNGSI

Sesuai dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 72 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang memiliki Tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di





bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- e. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Jombang dipimpin oleh Seorang Kepala Badan yang membawahi satu sekretariat dan empat bidang di dalam struktur organisasinya. Penjabaran mengenai tugas dan fungsi setiap komponen kepemimpinan yang ada di BPKAD adalah sebagai berikut :

1. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan aset, penyusunan program dan evaluasi.

Untuk menyelenggarakan tugas di atas, sekretariat mempunyai fungsi:

- a. Perumusan dan penyusunan kebijakan serta pedoman operasional pelaksanaan dan evaluasi kegiatan administrasi umum dan ketatausahaan, administrasi dan pengembangan pegawai, penyusunan rencana dan evaluasi program dan



- anggaran rumah tangga, serta penatakelolaan keuangan;
- b. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, kegiatan, anggaran dan perundang-undangan;
 - c. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang;
 - d. Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
 - e. Pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan urusan rumah tangga;
 - f. Pelaksanaan koordinasi dan pembinaan aparatur sipil negara;
 - g. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tata laksana serta pelayanan publik;
 - h. Pengelolaan aset;
 - i. Pengelolaan kearsipan;
 - j. Pelaksanaan koordinasi pengelolaan data dan sistem informasi;
 - k. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan strategis dan pelaksanaan program, kegiatan dan realisasi anggaran secara terukur dan berkelanjutan;
 - l. Penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi dan koordinasi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja dan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Perjanjian Kinerja (RKA), Indikator Kinerja Utama (IKU), Laporan Keuangan (LK), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di lingkup Badan;
 - m. Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis penyusunan rencana operasional berupa petunjuk teknis dan Standar Operasional Prosedur (SOP) serta Standar Pelayanan Publik (SPP);
 - n. Pelaksanaan koordinasi implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Reformasi Birokrasi; dan
 - o. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah.



2. Bidang Anggaran

Bidang Anggaran dipimpin oleh seorang kepala bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas BadanPengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, dibidang perencanaan anggaran, pelaksanaan dan evaluasi anggaran serta pengolahan data dan informasi keuangan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut di atas, bidang anggaran memiliki fungsi :

- a. Penyusunan pedoman penyusunan RKA-SKPD dalam rangka Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD)
- b. Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berdasarkan peraturanperundang-undangan yang berlaku;
- c. Pelaksanaan pembinaan dan pendampingan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- d. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- e. Melakukan verifikasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah/Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Perangkat Daerah;
- f. Fasilitasi dan koordinasi pengelolaan Pendapatan, belanja dan pembiayaan Perangkat Daerah;
- g. Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan;
- h. Penyusunan Analisis Standar Belanja;
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.



3. Bidang Akuntansi dan Perbendaharaan

Bidang Perbendaharaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, di bidang akuntansi, penerimaan kas daerah dan pengeluaran kas daerah. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut diatas, bidang perbendaharaan memiliki fungsi :

- a. Perumusan sistem dan prosedur akuntansi;
- b. Perumusan kebijakan akuntansi;
- c. Pelaksanaan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah;
- d. Penerbitan SP2D berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah;
- e. Pelaksanaan koordinasi dan rekonsiliasi dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, BUMD dan BLUD atas penyusunan pelaporan keuangan daerah;
- f. Pelaksanaan pencatatan atas penerimaan dan pengeluaran keuangan daerah;
- g. Pelaksanaan pembinaan penatausahaan dan pelaporan keuangan;
- h. Pelaksanaan penempatan uang daerah dan mengelola/ menatausahakan investasi;
- i. Pelaksanaan penyimpanan uang daerah;
- j. Pelaksanaan pemberian pertimbangan dalam pemberian pinjaman atas nama Pemerintah Daerah;
- k. Pelaksanaan rekonsiliasi dengan Bank/ Lembaga/ Pemerintah;
- l. Pelaksanaan koordinasi Tindak lanjut Rekomendasi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Daerah;
- m. Pemantauan pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah oleh bank dan/atau lembaga keuangan yang lainnya yang telah ditunjuk;
- n. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang



- Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- o. Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - p. Pelaksanaan penatausahaan gaji pegawai daerah;
 - q. Penatausahaan belanja Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD); dan
 - r. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

4. Bidang Aset

Bidang Aset Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, bidang analisis kebutuhan dan perencanaan, penatausahaan dan sistem informasi serta pengelolaan dan pengendalian aset daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut diatas, bidang Aset Daerah memiliki fungsi :

- a. Pengelolaan aset secara efisien, transparandan akuntabel;
- b. Pelaksanaan koordinasi penyusunan kebijakan, norma, pedoman standar, prosedur, petunjuk teknis pengelolaan aset;
- c. Penyiapan penetapan pedoman tentang pengelolaan aset Pemerintah Daerah;
- d. Pengelolaan dan penyajian data, laporan serta catatan atas laporan barang/ aset daerah;
- e. Pembinaan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, sistem dan mekanisme pengelolaan aset daerah;
- f. Pelaporan hasil realisasi pengadaan daerah maupun yang diperoleh dari kegiatan yang dibiayai oleh Pemerintah Pusatmaupun Pemerintah Provinsi;
- g. Penyelenggaraan administrasi operasional aset secara tertib, pengembangan manajemen serta kebijakan strategis aset



- daerah;
- h. Penyelenggaraan optimalisasi dan evaluasi aset;
- i. Penyelenggaraan pengamanan hukum atas tanah aset pemerintahan;
- j. Penyiapan penetapan kebijakan pengelolaan investasi dan aset daerah;
- k. Pengelolaan Sistem Informasi Barang Milik Daerah;
- l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

C. ISU – ISU STRATEGIS

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang, terdapat beberapa isu penting yang perlu adanya penyelesaian dan pembentukan langkah dan arah kebijakan dalam mengatasinya.

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi BPKAD pada Tahun 2023 yaitu sebagai berikut :

1. Dalam penyusunan Peraturan Daerah dan peraturan Bupati APBD dengan menggunakan SIPD-RI pada Tahun 2023 masih dalam tahap pengembangan dan masih belum stabil;
2. Perubahan kebijakan terkait penggunaan SIPD dan SIPD-RI;
3. Dalam pelaksanaan Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan dibutuhkan jaringan internet yang cepat dan stabil, namun jaringan internet belum cukup memadai;
4. Perubahan kebijakan akuntansi dan sistem akuntansi pemerintah daerah;
5. Penyelesaian masalah sistem SIPD masih dilakukan oleh Tim Pusdatin Pusat;
6. Terdapat beberapa rekening dalam sistem penatausahaan yang belum sesuai dengan DPA;
7. Masih terdapat 1.219 bidang aset tanah belum bersertipikat
8. Adanya amanat Permendagri 47/2021 untuk penggunaan sistem aplikasi



- penatausahaan BMD dengan menggunakan e-BMD dari Kemendagri;
9. Kurangnya SDM yang menangani arsip, baik kekurangan jumlah maupun kemampuan/kuantitas;
 10. Terbatasnya tempat penyimpanan arsip, baik arsip dinamis maupun arsip statis.

Tantangan yang harus dihadapi BPKAD pada Tahun 2022 yaitu sebagai berikut:

1. Perlu kesepakatan dan komitmen antara BPKAD, APIP dan DPRD terkait aturan yang dipakai dalam penyusunan dokumen penganggaran;
2. Beberapa report SIPD RI sebagai bagian lampiran baik Perda maupun Perbup APBD belum tersedia;
3. Treatment pelaporan keuangan BLUD yang berbeda dengan pelaporan keuangan OPD lainnya;
4. Terdapat 372 bidang aset dengan riwayat alas hak TKD
5. Terdapat 340 bidang tidak didukung dokumen perolehan yang lengkap
6. Sistem aplikasi e- BMD masih belum sepenuhnya dapat menyajikan data dan informasi penatausahaan BMD dengan mengakomodir kebijakan aset daerah yang bersifat lokal;
7. SDM Pengurus Barang yang masih kurang dalam penggunaan aplikasi penatausahaan BMD, baik Simda BMD maupun e-BMD;
8. Penanganan arsip tidak bisa maksimal dan memadai;
9. Proses pemusnahan arsip belum dapat dilakukan karena menunggu jadwal retensi arsip berdasarkan prosedur pemusnahan arsip sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam menghadapi tantangan tersebut, terdapat beberapa peluang yang dapat dimanfaatkan sebagai kekuatan. Adapun peluang yang dimiliki oleh BPKAD yaitu sebagai berikut :

1. Komitmen Pimpinan yang sangat kuat dalam upaya peningkatan pelayanan BPKAD dalam seluruh aspek pelayanan;



2. Kualitas & Kapabilitas pegawai pengelolaan keuangan dan aset yang masih bisa dikembangkan secara optimal;
3. Peran strategis BPKAD dalam melakukan pengelolaan keuangan dan aset daerah;

Rekomendasi dan catatan strategis serta informasi atas kegiatan/sub kegiatan yang menunjang keberhasilan atau mengakibatkan kegagalan untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas Tahun 2023 yaitu sebagai berikut:

1. Permasalahan atas 1.219 bidang aset tanah yang belum bersertipikat diintervensi melalui sub kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah dengan mengupayakan adanya sinkronisasi pemahaman regulasi terkait, untuk DPMD dan BPKAD terkait 372 bidang aset dengan riwayat alas hak TKD. Selain itu, perlu diperhatikan untuk setiap SKPD yang melakukan pengadaan aset tanah wajib mendokumentasikan dengan baik seluruh dokumen riwayat perolehan aset tanahnya;
2. Dengan terbitnya Permendagri Nomor 47 Tahun 2021 untuk penggunaan sistem aplikasi penatausahaan BMD. Untuk menjawab tantangan atas aplikasi e- BMD yang masih belum sepenuhnya dapat menyajikan data dan informasi penatausahaan BMD dengan mengakomodir kebijakan aset daerah yang bersifat lokal menggunakan e-BMD dari Kemendagri melalui sub kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah perlu dilaksanakannya *coaching clinic* untuk mendapat arahan atas kendala teknis yang ditemui, yang diperoleh secara langsung dari BPKP dan Kemendagri harus tetap teranggarkan. Selain itu, Diperlukan tambahan alokasi anggaran untuk Pembinaan Teknis Pengelolaan BMD, bagi peningkatan SDM Pengurus Barang terhadap implementasi aplikasi e BMD;
3. Pengelolaan arsip yang belum memadai perlu diperbaiki dengan mengusulkan pada BKPSDM Kabupaten Jombang untuk penyelenggaraan diklat pengelolaan arsip serta lewat sub kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasaran Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya BPKAD Kabupaten Jombang dapat melakukan pengusulan untuk melakukan perluasan



tempat penyimpanan arsip karena masih belum tersedianya opsi untuk melakukan pemusnahan atas arsip lama.

D. CASECADING KINERJA (KETERHUBUNGAN DENGAN RPJMD)

Rencana Strategis (RENSTRA) merupakan dokumen perencanaan suatu unit organisasi yang penyusunannya disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi dari unit organisasi tersebut dan berjangka waktu 5 (lima) tahun.

Adapun peran penting Renstra bagi instansi Pemerintah adalah sebagai berikut:

1. Merupakan dokumen yang digunakan untuk mempermudah pelaksanaan akuntabilitas. Tanpa adanya Renstra, mekanisme dan pelaksanaan akuntabilitas akan sulit untuk dilakukan oleh organisasi.
2. Dokumen yang digunakan untuk memberikan arah dan tujuan organisasi melangkah lebih maju di masa depan seiring dengan perkembangan dinamis yang ada. Dengan adanya Renstra, tentunya *stakeholders* dapat menilai apakah organisasi telah menuju kepada arah yang diinginkan atautkah telah mencapai apa yang diharapkan.
3. Merupakan dokumen perencanaan yang menggambarkan arah dan pengembangan unit kerja dan program pelayanan publik yang bersifat strategis dalam jangkauan perubahan kedepan.
4. Sebagai acuan bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset.

Renstra BPKAD yang merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat secara bersama-sama antar pimpinan dan seluruh komponen organisasi untuk diimplementasikan oleh seluruh jajarananya dalam rangka pencapaian visi dan misi BPKAD. Perumusan rencana strategis tersebut mengikuti pola yang merupakan tahapan-tahapan dimulai dari yang paling ideal/kualitatif sampai dengan yang paling teknis dan kuantitatif. Tahapan-tahapan tersebut merupakan rangkaian yang memiliki saling keterkaitan untuk mencapai suatu tujuan bersama yang merupakan visi dan misi organisasi.



1. Pernyataan Visi

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan, berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan, dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen *stakeholder's*. Visi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang adalah sebagai berikut :

“BERSAMA MEWUJUDKAN JOMBANG YANG BERKARAKTER DAN BERDAYA SAING”

Penetapan Visi tersebut merupakan perwujudan cita-cita dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah guna penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di kabupaten Jombang, agar dapat berjalan dengan lebih dinamis dan tercapai dalam kurun waktu 5 (lima) Tahun kedepan.

2. Pernyataan Misi

Misi adalah landasan Strategis dalam mencapai tujuan organisasi yang secara bersama-sama akan diusahakan terwujud oleh seluruh komponen organisasi. Atas dasar itu semua, maka sesuai visi, tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang ada maka ditetapkan misi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang adalah : **“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih dan Profesional”**.

Dengan menyelaraskan Misi dan Tugas Pokok Fungsi maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang berupaya mewujudkan masyarakat di Kabupaten Jombang yang *Madani* dengan menciptakan Sistem dan Prosedur yang mampu meningkatkan akses masyarakat dalam Pemerintahan.

Misi tersebut mengandung makna bahwa Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang bertekad untuk senantiasa memperbaiki kinerja dinas. Andal yang dimaksud yakni bertekad untuk :

1. Mewujudkan pengelolaan anggaran yang efektif, efisien, berbasis kinerja dan data serta dalam kerangka pengeluaran jangka menengah, yang artinya :



- a. Perencanaan anggaran disusun berdasarkan pada potensi dan capaian target kinerja berupa *output* dan *outcomes* yang akan dicapai oleh organisasi (*Performance budgeting* atau anggaran berbasis kinerja);
 - b. Penyusunan anggaran belanja kegiatan harus didasarkan pada data capaian *outcome* tahun sebelumnya dan rencana target penyelesaian kedepan, sehingga suatu kegiatan ada masa selesainya,, tidak terus menerus atau dalam kerangka pengeluaran jangka menengah;
 - c. Penyusunan dan pelaksanaan penganggaran harus didasarkan prinsip efisien atas penggunaan sumber daya input tetapi tetap efektif atau tepat sasaran. Sumber daya keuangan harus dikelola secara ekonomis, efisien dan efektif.
2. Mewujudkan Pengelolaan Aset Daerah Yang Tertib, Efektif dan Efisien, yang artinya :
- a. Sistem perencanaan kebutuhan barang yang efektif dan efisien dalam menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - b. Penatausahaan dan pelaporan barang yang tertib;
 - c. Inventarisasi asset yang berkelanjutan guna tersedianya data asset yang valid, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan;
 - d. Optimalisasi pemanfaatan asset guna menunjang program pembangunan dan meningkatkan pendapatan.
3. Mewujudkan Optimalisasi Pengelolaan Perbendaharaan Daerah, yang artinya bahwa BPKAD dalam melaksanakan pengelolaan perbendaharaan daerah mulai dari kegiatan menerima, menyimpan, membayar atau menyerahkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang dan surat berharga dilaksanakan secara efisien, efektif, transparan dan akuntabel.
4. Mewujudkan Laporan Keuangan Daerah yang Akuntabel dan Fasilitasi Pembinaan Pengelolaan Keuangan, yang artinya bahwa Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang

bertekad mewujudkan pelaporan keuangan daerah yang akuntabel dan fasilitasi pembinaan pengelolaan keuangan agar dapat menyajikan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan selama satu periode pelaporan.

3. Tujuan, Sasaran dan Indikator

Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang sebagai perwujudan dari pendayagunaan lingkungan Strategis yang ada bertujuan :

” Meningkatkan Akuntabilitas dan Kinerja Reformasi Birokrasi”

Dalam mewujudkan tujuan suatu organisasi diperlukan sasaran yang terarah agar komponen dalam suatu organisasi memahami sasaran yang akan dicapai. Dalam mewujudkan suatu tujuan perlu ditetapkan strategi berupa kegiatan dan program. Sasaran yang hendak dicapai di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang adalah :

- a) **Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah**, dengan indikator sasarannya, adalah :
 - Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (Pada sektor pengelolaan keuangan non pendapatan)
 - Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah

- b) **Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**, dengan indikator sasarannya, adalah :
 - Nilai SAKIP

Tabel 2.1 Matriks Hubungan antara Tujuan dan Sasaran

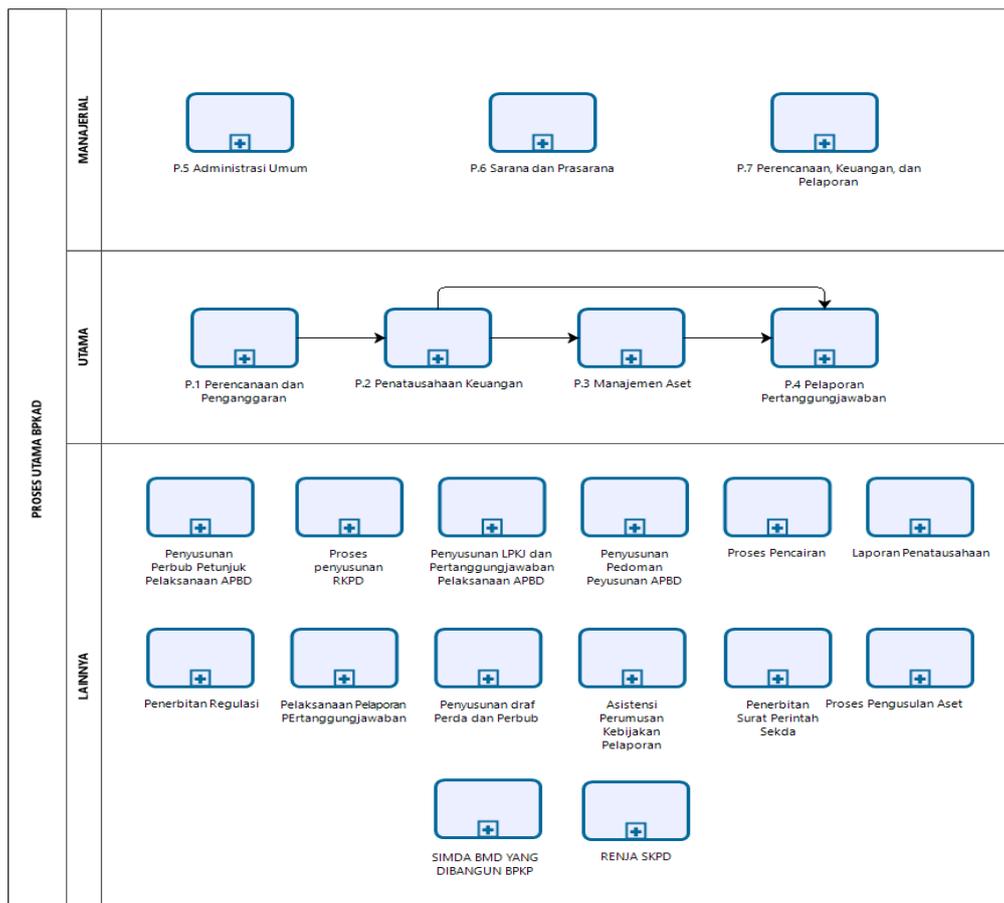
TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	
Uraian	Uraian	Indikator
Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja reformasi birokrasi	1. Meningkatkan kualitas pengelolaan	1. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (Pada sektor pengelolaan keuangan



TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	
Uraian	Uraian	Indikator
	keuangan dan asset daerah	non pendapatan) = 82%
		2. Indeks Pengelolaan Aset Daerah
	2. Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	1. Nilai SAKIP

C. PETA PROSES BISNIS

Berdasar Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Proses Bisnis Instansi Pemerintah. Adapun peta proses bisnis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang sebagai berikut :



Pada proses bisnis level 0 menggambarkan peta proses bisnis yang memuat seluruh proses bisnis pada unit kerja yang terdiri dari proses bisnis utama, proses bisnis manajerial dan proses bisnis pendukung. Mengacu pada dokumen rencana strategis bahwa tujuan dan keluaran utama yang ingin dicapai oleh organisasi adalah meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah.

D. RINGKASAN HASIL EVALUASI

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Jombang memperoleh nilai 82,48 atau predikat A. Penilaian tersebut menunjukkan memuaskan dalam memimpin perubahan, berkinerja tinggi dan sangat akuntabel tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kerjanya memadai, serta kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan



yang berorientasi pada hasil menunjukkan hasil yang sangat memuaskan. Rincian penilaian tersebut adalah sebagai berikut :

No	Tahun 2022			No	Tahun 2023		
	Komponen yang dinilai	Bobot	Nilai		Komponen yang dinilai	Bobot	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	30	26,41	1	Perencanaan Kinerja	30	26,41
2	Pengukuran Kinerja	30	25,61	2	Pengukuran Kinerja	30	25,61
3	Pelaporan Kinerja	15	8,18	3	Pelaporan Kinerja	15	12,05
4	Evaluasi Kinerja	25	20,28	4	Evaluasi Kinerja	25	18,41
Nilai Hasil Evaluasi			80,48	Nilai Hasil Evaluasi			82,48
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			A	Tingkat Akuntabilitas Kinerja			A

Pada Tahun 2023, nilai SAKIP mengalami kenaikan sebesar 2,00. Secara umum beberapa catatan evaluasi akuntabilitas kinerja internal di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Jombang adalah sebagai berikut :

NO	ISI REKOMENDASI	TINDAK LANJUT REKOMENDASI
1.	Melakukan evaluasi atas target yang akan ditetapkan evaluasi atas target yang akan ditetapkan dengan berdasarkan pada realisasi target tahun sebelumnya, hambatan, dan permasalahan yang dihadapi dalam mencapai target yang ditetapkan.	Telah ditindaklanjuti dengan membuat berita acara komitmen perubahan target kinerja Tahun 2023



NO	ISI REKOMENDASI	TINDAK LANJUT REKOMENDASI
2.	Memberikan informasi program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan atau mengakibatkan kegagalan dalam pencapaian kinerja dalam laporan kinerja.	Informasi terkait program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan atau mengakibatkan kegagalan dalam pencapaian kinerja telah tertuang pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2023.
3.	Memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja sebelumnya untuk perbaikan dan peningkatan target kinerja.	Hasil evaluasi kinerja pada tahun 2022 telah menjadi pertimbangan untuk perbaikan dan peningkatan



BAB II
PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis (RENSTRA) merupakan dokumen perencanaan suatu unit organisasi yang penyusunannya disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi dari unit organisasi tersebut dan berjangka waktu 5 (lima) tahun.

Adapun peran penting Renstra bagi instansi Pemerintah adalah sebagai berikut :

1. Merupakan dokumen yang digunakan untuk mempermudah pelaksanaan akuntabilitas. Tanpa adanya Renstra, mekanisme dan pelaksanaan akuntabilitas akan sulit untuk dilakukan oleh organisasi.
2. Dokumen yang digunakan untuk memberikan arah dan tujuan organisasi melangkah lebih maju di masa depan seiring dengan perkembangan dinamis yang ada. Dengan adanya Renstra, tentunya *stakeholders* dapat menilai apakah organisasi telah menuju kepada arah yang diinginkan atautkah telah mencapai apa yang diharapkan.
3. Merupakan dokumen perencanaan yang menggambarkan arah dan pengembangan unit kerja dan program pelayanan publik yang bersifat strategis dalam jangkauan perubahan kedepan.
4. Sebagai acuan bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset.

Renstra BPKAD yang merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat secara bersama-sama antar pimpinan dan seluruh komponen organisasi untuk diimplementasikan oleh seluruh jajarannya dalam rangka pencapaian visi dan misi BPKAD. Perumusan rencana strategis tersebut mengikuti pola yang merupakan tahapan-tahapan dimulai dari yang paling ideal/kualitatif sampai dengan yang paling teknis dan kuantitatif. Tahapan-tahapan tersebut merupakan rangkaian yang memiliki saling keterkaitan untuk mencapai suatu tujuan bersama yang merupakan visi dan misi organisasi.



1. Pernyataan Visi

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan, berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan, dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen *stakeholder's*. Visi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang adalah sebagai berikut :

“BERSAMA MEWUJUDKAN JOMBANG YANG BERKARAKTER DAN BERDAYA SAING”

Penetapan Visi tersebut merupakan perwujudan cita-cita dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah guna penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di kabupaten Jombang, agar dapat berjalan dengan lebih dinamis dan tercapai dalam kurun waktu 5 (lima) Tahun kedepan.

2. Pernyataan Misi

Misi adalah landasan Strategis dalam mencapai tujuan organisasi yang secara bersama-sama akan diusahakan terwujud oleh seluruh komponen organisasi. Atas dasar itu semua, maka sesuai visi, tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang ada maka ditetapkan misi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang adalah : **“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih dan Profesional”**.

Dengan menyelaraskan Misi dan Tugas Pokok Fungsi maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang berupaya mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih dan profesional dengan menciptakan Sistem dan Prosedur yang mampu meningkatkan akses masyarakat dalam Pemerintahan.

Misi tersebut mengandung makna bahwa Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang bertekad untuk senantiasa memperbaiki kinerja instansi dan menjaga lingkungan kerja yang ideal dan berintegritas. Untuk mewujudkan misi tersebut BPKAD Kabupaten Jombang bertekad untuk :



1. Mewujudkan Pengelolaan Anggaran yang efektif, efisien, berbasis kinerja dan data serta dalam kerangka pengeluaran jangka menengah, yang artinya :
 - a. Perencanaan anggaran disusun berdasarkan pada potensi dan capaian target kinerja berupa *output* dan *outcomes* yang akan dicapai oleh organisasi (*Performance budgeting* atau anggaran berbasis kinerja);
 - b. Penyusunan anggaran belanja kegiatan harus didasarkan pada data capaian *outcome* tahun sebelumnya dan rencana target penyelesaian kedepan, sehingga suatu kegiatan ada masa selesainya, tidak terus menerus atau dalam kerangka pengeluaran jangka menengah;
 - c. Penyusunan dan pelaksanaan penganggaran harus didasarkan prinsip efisien atas penggunaan sumber daya input tetapi tetap efektif atau tepat sasaran. Sumber daya keuangan harus dikelola secara ekonomis, efisien dan efektif.
2. Mewujudkan Pengelolaan Aset Daerah Yang Tertib, Efektif dan Efisien, yang artinya :
 - a. Sistem perencanaan kebutuhan barang yang efektif dan efisien dalam menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - b. Penatausahaan dan pelaporan barang yang tertib;
 - c. Inventarisasi aset yang berkelanjutan guna tersedianya data aset yang valid, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan;
 - d. Optimalisasi pemanfaatan asset guna menunjang program pembangunan dan meningkatkan pendapatan.
3. Mewujudkan Optimalisasi Pengelolaan Perbendaharaan Daerah, yang artinya bahwa BPKAD dalam melaksanakan pengelolaan perbendaharaan daerah mulai dari kegiatan menerima, menyimpan, membayar atau menyerahkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang dan surat berharga dilaksanakan secara efisien, efektif, transparan dan akuntabel.

4. Mewujudkan Laporan Keuangan Daerah yang Akuntabel dan Fasilitasi Pembinaan Pengelolaan Keuangan, yang artinya bahwa Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang bertekad mewujudkan pelaporan keuangan daerah yang akuntabel dan fasilitasi pembinaan pengelolaan keuangan agar dapat menyajikan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan selama satu periode pelaporan.

3. Tujuan, Sasaran dan Indikator

Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang sebagai perwujudan dari pendayagunaan lingkungan Strategis yang ada bertujuan :

” Meningkatkan akuntabilitas dan kinerja reformasi birokrasi”

Dalam mewujudkan tujuan suatu organisasi diperlukan sasaran yang terarah agar komponen dalam suatu organisasi memahami sasaran yang akan dicapai. Dalam mewujudkan suatu tujuan perlu ditetapkan strategi berupa kegiatan dan program. Sasaran yang hendak dicapai di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang adalah :

- a) **Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah**, dengan indikator sasarannya, adalah :
 - Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah
 - Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah

- b) **Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**, dengan indikator sasarannya adalah :
 - Nilai SAKIP

d

Tabel 2.1 Matriks Hubungan antara Tujuan dan Sasaran

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	
Uraian	Uraian	Indikator
Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja reformasi birokrasi	1. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan asset daerah	1. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah
		2. Indeks Pengelolaan Aset Daerah
	2. Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	1. Nilai SAKIP

B. Rencana Kerja

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari Reviu Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2018-2023, disusun suatu Rencana Kinerja (*Performance Plan*) setiap tahunnya. Rencana kinerja yang harus dicapai dalam satu tahun pelaksanaan yang menunjukkan nilai kuantitatif yang melihat pada setiap indikator kinerja baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat kegiatan, dan merupakan pembanding bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan akhir periode pelaksanaan. Berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2018-2023, telah dilakukan keselarasan dari misi terhadap sasaran, indikator kinerja dan program. Sebagai bentuk penjabaran terhadap perencanaan anggaran dan sebagai upaya mewujudkan tertib pengelolaan keuangan, BPKAD Kabupaten Jombang telah menetapkan sebanyak 3 (tiga) program yang dijabarkan dalam 11 (sebelas) kegiatan dan 65 (enam puluh lima) sub kegiatan berdasarkan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2023, yaitu :



Tabel 2.2
Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2022

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Skor Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran
		Skor Kesesuaian pegalokasian anggaran belanja
		Skor transparansi pengelolaan keuangan daerah
		Skor penyerapan anggaran
		Skor Opini BPK atas LKPD
5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Prosentase Kesesuaian nomer-klatur program RKPD dan KUA-PPAS;
		Prosentase Kesesuaian nomer-klatur program KUA PPAS dan APBD;
		Prosentase Kesesuaian pagu program RKPD dan KUA-PPAS; dan
		Prosentase Kesesuaian pagu program KUA-PPAS dan APBD.
		Tingkat ketepatan waktu penyampaian RAPBD dan RPAPBD ke DPRD tepat waktu
5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen KUA dan PPAS yang disusun
5.02.02.2.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah dokumen perubahan KUA dan perubahan PPAS yang disusun
5.02.02.2.03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang diverifikasi
5.02.02.2.04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah perubahan RKA-SKPD yang diverifikasi
5.02.02.2.05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA-SKPD yang diverifikasi
5.02.02.2.06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah perubahan DPA-SKPD yang diverifikasi
5.02.02.2.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD
5.02.02.2.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah peraturan daerah tentang perubahan APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD
5.02.02.2.09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	jumlah dokumen regulasi serta kebijakan bidang anggaran
5.02.02.2.10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	jumlah dokumen hasil koordinasi perencanaan anggaran pendapatan
5.02.02.2.11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	jumlah dokumen hasil koordinasi perencanaan anggaran belanja daerah



Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
5.02.02.2.12	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah dokumen hasil koordinasi perencanaan anggaran pembiayaan
5.02.02.2.13	Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan penganggaran daerah pemerintah kabupaten/kota
5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Prosentase rata-rata realisasi belanja SKPD
5.02.02.2.02.01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan pengelolaan kas daerah
5.02.02.2.02.03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah dokumen hasil pengendalian dan penerbitan anggaran kas dan SPD
5.02.02.2.02.04	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah dokumen hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah
5.02.02.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah, laporan aliran kas dan pelaksanaan pemungutan/pemotongan dan penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
5.02.02.2.02.08	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah dokumen hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas
5.02.02.2.02.09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah dokumen hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait
5.02.02.2.02.10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan
5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Prosentase rata-rata realisasi belanja Bantuan Keuangan, BTT dan Dana Bagi Hasil
5.02.02.2.04.08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
5.02.02.2.04.09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak
5.02.02.2.04.10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota



Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Prosentase OPD yang menyusun LK OPD tepat waktu
5.02.02.2.03.01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah laporan hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah
5.02.02.2.03.02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah dokumen hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban
5.02.02.2.03.03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran
5.02.02.2.03.04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
5.02.02.2.03.05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
5.02.02.2.03.09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah
5.02.02.2.03.10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah
5.02.02.2.03.11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Bobot persentase SKPD yang menyusun Laporan BMD tepat waktu
		Bobot Peningkatan capaian pemanfaatan aset
		Bobot Peningkatan capaian aset daerah yang bersertifikat
5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Prosentase OPD yang menyusun laporan BMD tepat waktu
		Prosentase pengelolaan aset yang dimanfaatkan
		Prosentase pengajuan sertifikasi aset daerah
		Prosentase aset daerah yang terinventarisasi dalam laporan BMD tematik tahunan
5.02.03.2.01.01	Penyusunan Standar Harga	Jumlah standar harga yang tersusun



Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
5.02.03.2.01.02	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah
5.02.03.2.01.03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah SKPD
5.02.03.2.01.04	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah
5.02.03.2.01.05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD
5.02.03.2.01.06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah
5.02.03.2.01.07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah SKPD
5.02.03.2.01.08	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah laporan hasil penilaian barang milik daerah dan hasil koordinasi penilaian barang milik daerah SKPD
5.02.03.2.01.09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan hasil pembinaan, pengawasan, pengendalian barang milik daerah SKPD
5.02.03.2.01.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah
5.02.03.2.01.11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD
5.02.03.2.01.12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD
5.02.03.2.01.13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil pembinaan, pengawasan, pengendalian barang milik daerah SKPD
x.xx.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase penunjang urusan pemerintah daerah yang disusun sesuai aturan
x.xx.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase dokumen perencanaan dan laporan keuangan yang tersusun tepat waktu
x.xx.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan daerah
x.xx.01.2.01.06	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah evaluasi kinerja perangkat daerah
x.xx.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase penunjang kelancaran administrasi perkantoran
x.xx.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang tersedia
x.xx.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi keuangan SKPD
x.xx.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen Laporan Keuangan SKPD
x.xx.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil



Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
	Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
x.xx.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase penunjang kelancaran administrasi perkantoran
x.xx.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan
x.xx.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan
x.xx.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan
x.xx.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan
x.xx.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan
x.xx.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah paket Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan
x.xx.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
x.xx.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase sarana dan prasarana aparatur yang menunjang kinerja pelayanan
x.xx.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan
x.xx.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase penunjang kelancaran administrasi perkantoran
x.xx.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan Jasa Surat Menyurat
x.xx.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
x.xx.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan
x.xx.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase sarana dan prasarana aparatur yang menunjang kinerja pelayanan
x.xx.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya
x.xx.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya
x.xx.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi
x.xx.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi

C. Indikator Kinerja Utama

Selanjutnya, untuk membantu kelancaran proses penyusunan program kegiatan dan anggaran perlu dilakukan pemilahan antara program prioritas dengan program reguler. Sebagai ilustrasi, berikut ini diinformasikan rencana kinerja prioritas BPKAD Kabupaten Jombang adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3 Target Dan Indikator Kinerja Utama Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		Satuan	Target
1	2		3	4
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	1.	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	-	74,50
	2.	Indeks Pengelolaan Aset Daerah	-	62,50
Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	1.	Nilai SAKIP	-	80,30

D. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan juga pemberian sanksi/*punishment*.

BPKAD Kabupaten Jombang telah membuat Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi yang ada, penetapan kinerja ini merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2023. Penetapan kinerja tahun 2023 disajikan dalam tabel sebagai berikut:



Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja BPKAD Kabupaten Jombang
Tahun 2023

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
			TAHUNAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (Pada sektor pengelolaan keuangan non pendapatan) = 82 %	74,50
		Indeks Pengelolaan Aset Daerah	62,50
2.	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	80,30

NO.	SASARAN PROGRAM	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET TAHUNAN (%)	ANGGARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(10)
1.	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Skor Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran	0,95	617.208.528.390
			Skor Kesesuaian pegalokasian anggaran belanja	1,00	
			Skor transparansi pengelolaan keuangan daerah	0,84	
			Skor penyerapan anggaran	0,75	
			Skor Opini BPK atas LKPD	1,00	
		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Bobot persentase SKPD yang menyusun Laporan BMD tepat waktu	88%	2.666.139.200



NO.	SASARAN PROGRAM	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET TAHUNAN (%)	ANGGARAN
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>	<i>(10)</i>
			Bobot Peningkatan capaian pemanfaatan aset	64%	
			Bobot Peningkatan capaian aset daerah yang bersertifikat	43%	
2.	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Prosentase penunjang urusan pemerintah daerah yang disusun sesuai aturan	100%	45.093.507.459



BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi yang terdiri dari berbagai komponen yg merupakan suatu kesatuan yaitu perencanaan stratejik, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja.

Perencanaan Stratejik merupakan Suatu proses yg berorientasi pada hasil yg ingin dicapai dalam kurun waktu 1-5 tahun secara sistematis dan berkesinambungan. Proses ini menghasilkan suatu rencana stratejik yg memuat visi, misi, tujuan, sasaran, dan program yang realistis dan mengantisipasi masa depan yang diinginkan dan dapat dicapai.

Perencanaan Kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program , kebijakan, sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana stratejik. Hasil dari proses ini berupa Rencana Kinerja Tahunan.

Pada Bab ini akan disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, analisis dan evaluasi akuntabilitas kinerja, termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah yang diambil guna mengatasi hambatan/kendala dan permasalahan.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan program kegiatan BPKAD pada tahun anggaran berkenaan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah



ditetapkan dalam RENSTRA, visi dan misi BPKAD Kabupaten Jombang. Pengukuran kinerja ini, dilakukan dengan cara membandingkan antara capaian target pada indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja (TAPKIN) dengan realisasi.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan target dan realisasi dengan capaian kinerja tahun sebelumnya. Acuan untuk menilai kinerja SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang adalah Renstra Perubahan Tahun 2018-2023, Renja Perubahan Tahun 2023 dan Kertas Kerja Penetapan Target Tahun 2023. Sedangkan Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan acuan untuk mengukur keberhasilan dan kegagalan capaian kinerja prioritas yang bersifat strategis.

Tabel 3.1
Capaian Kinerja BPKAD Kabupaten Jombang
Tahun 2023

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1	2	3	4	5	6
1.	Mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	74,50	77,00	103,86%
		Indeks Pengelolaan Barang Milik daerah	60,00	77,91	129,85%
2.	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	80,3	82,48	102,71%

Hasil pencapaian kinerja sasaran sebagaimana tersebut diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:



a. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah

Nilai perhitungan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah adalah :

**Jumlah Komponen A + Komponen B + Komponen C + Komponen D +
Komponen E**

Keterangan :

Komponen A : Indeks Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran x bobot (Bobot 12%)

Komponen B : Indeks Pengalokasian anggaran belanja (Bobot 20%)

Komponen C : Indeks Transparansi pengelolaan keuangan daerah (Bobot 15%)

Komponen D : Indeks Penyerapan anggaran (Bobot 20%)

Komponen E : Indeks Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas LKPD (Bobot 15%)

Adapun evaluasi dan analisis kinerja yang dicapai pada tahun 2021 untuk masing-masing indikator adalah sebagai berikut :

1) Indeks Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran x bobot (Bobot 12%). Evaluasi terhadap tingkat kesesuaian program kegiatan dan subkegiatan pada dokumen RKPD, KUA PPAS maupun APBD dengan hasil sebagai berikut:

1. Kesesuaian Program Pada Dokumen RKPD dan PPAS TA 2022

Jumlah Program	129
Jumlah Yang Sesuai	129
Jumlah Yang tidak Sesuai	0
Jumlah Kesesuaian Program RKPD dan KUA PPAS	100 %

2. Kesesuaian Pagu Program Pada Dokumen RKPD dan PPAS TA 2022

Jumlah Program	129
Jumlah Yang Sesuai	129
Jumlah Yang tidak Sesuai	0
Jumlah Kesesuaian Program RKPD dan KUA PPAS	100 %

3. Kesesuaian Program Pada Dokumen PPAS dan APBD TA 2022

Jumlah Program	129
----------------	-----



Jumlah Yang Sesuai	129
Jumlah Yang tidak Sesuai	0
Jumlah Keseuaian Program PPAS dan APBD	100 %
4. Kesesuaian Pagu Program Pada Dokumen PPAS dan APBD TA 2022	
Jumlah Program	117
Jumlah Yang Sesuai	129
Jumlah Yang tidak Sesuai	0
Jumlah Keseuaian Program RKPD dan KUA PPAS	90,70 %

Akumulasi perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{100\% + 100\% + 100\% + 90,70\%}{4} = 97,675\% \times \text{bobot} = 11,721\%$$

Jadi skor atas Indeks Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran adalah sebesar 11,721%.

2) Komponen B : Indeks Pengalokasian anggaran belanja (Bobot 20%)

Dimensi Perhitungan Indeks antara lain :

Indikator	Prasyarat	Skor
Alokasi jumlah belanja untuk fungsi pendidikan minimal 20% dari APBD	Memenuhi	1
	Tidak memenuhi	0
Alokasi jumlah belanja untuk fungsi kesehatan minimal 10% dari APBD di luar gaji	Memenuhi	1
	Tidak memenuhi	0
Alokasi jumlah belanja untuk infrastruktur yang langsung dalam alokasi dana transfer sebesar minimal 25% dari Dana Transfer Umum	Memenuhi	1
	Tidak memenuhi	0
Alokasi jumlah belanja memenuhi Standar Pelayanan Minimal	Memenuhi	1
	Tidak memenuhi	0



Adapun evaluasi dan analisis kinerja yang dicapai pada tahun 2023 untuk masing-masing indikator adalah sebagai berikut :

- a) Alokasi jumlah belanja untuk fungsi pendidikan minimal 20% dari APBD Total anggaran.

Belanja Pendidikan	: Rp.	872.118.379.999,00
Total APBD	: Rp.	3.142.679.191.284,00
Prosentase	:	27,75%

- b) Alokasi jumlah belanja untuk fungsi kesehatan minimal 10% dari APBD di luar gaji

Belanja Kesehatan	: Rp.	698.165.309.022,00
Total APBD	: Rp.	2.149.955.467.666,00
Prosentase	:	32,47%

- c) Alokasi jumlah belanja untuk infrastruktur yang langsung dalam alokasi dana transfer sebesar minimal 25% dari Dana Transfer Umum

Belanja Infrastruktur	: Rp.	770.519.993.623,00
Total APBD	: Rp.	2.689.961.108.310,00
Prosentase	:	28,64%

- d) Alokasi jumlah belanja memenuhi Standar Pelayanan Minimal

Belanja SPM	: Rp.	132.435.974.645,00
Belanja Daerah	: Rp.	3.142.679.191.284,00
Rasio Belanja SPM terhadap Belanja Daerah	:	4,21%

Sehingga rata-rata nilai Indeks Pengalokasian anggaran belanja sebesar 20%.

- 3) Komponen C : Indeks Transparansi pengelolaan keuangan daerah (Bobot 15%)

Telah diupload dokumen pengelolaan keuangan antara lain :

1. Peraturan Daerah tentang APBD TA 2023
2. Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD TA 2023
3. Ringkasan RKPD TA 2023
4. Ringkasan RKA SKPD TA 2023



5. Ringkasan RKA PKPD TA 2023
6. Ringkasan RPD tentang APBD TA 2023
7. Ringkasan DPA SKPD TA 2023
8. Ringkasan DPPA-SKPD 2023
9. Ringkasan DPPA-PPKD 2023
10. PPAS APBD TA 2023
11. KUA TA 2023
12. Ringkasan Dokumen Rancangan Perubahan APBD
13. Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD TA 2023
14. Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD TA 2023
15. Ringkasan RKA SKPD Perubahan APBD TA 2023

Sehingga rata-rata Indeks Transparansi Pengelolaan Keuangan daerah adalah sebesar 15%

4) Komponen D : Indeks Penyerapan anggaran (Bobot 20%)

Dimensi perhitungan adalah sebagai berikut :

No	Indikator	Presentase Penyerapan Anggaran	Skor
1	Penyerapan anggaran belanja pegawai	88,67	1
2	Penyerapan anggaran belanja barang dan jasa	100,88	1
3	Penyerapan anggaran belanja subsidi	99,99	1
4	Penyerapan anggaran belanja hibah	98,41	1
5	Penyerapan anggaran belanja bantuan sosial	97,04	1
6	Penyerapan anggaran belanja modal	71,24	0
7	Penyerapan anggaran belanja tidak terduga	26,52	0
8	Penyerapan anggaran belanja transfer	100,00	1

Berdasarkan indikator belanja yang ada, indikator penyerapan anggaran belanja tidak terduga hanya terserap sebanyak 26,52%, dan penyerapan anggaran modal hanya terserap sebesar 71,24%. Dari masing-masing indikator tersebut dapat disimpulkan bahwa nilai rata-rata dari Indeks penyerapan anggaran adalah 15%.



- 5) Komponen E : Indeks Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas LKPD (Bobot 15%)

Pada Tahun 2023, Kabupaten Jombang kembali memperoleh Opini WTP atas LKPD Tahun 2022. Dengan ini bahwa Pemerintah Kabupaten Jombang telah 10 (sepuluh) kali berturut-turut memperoleh Opini WTP. Atas hal tersebut maka Indeks Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas LKPD adalah sebesar 15%.

Dalam hal ini indikator kinerja utama didukung 1 (satu) program, yaitu pada program Pengelolaan Keuangan Daerah dengan 1 (satu) indikator program yang terformulasikan dalam perhitungan : IKU - Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagai berikut :

$$\begin{aligned} &= \text{Indikator A} + \text{Indikator B} + \text{Indikator C} + \text{Indikator D} + \text{Indikator E} \\ &= 11,721 + 20 + 15 + 15 + 15 \\ &= \mathbf{76,721 \%} \end{aligned}$$

adalah capaian IKU (Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah) tahun 2023.

b. Indeks Pengelolaan Aset Daerah

Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri dari 3 variabel yakni : Persentase OPD yang tepat waktu pelaporan BMD, Persentase Peningkatan Capaian Sertifikasi Aset, dan Persentase Peningkatan Capaian Pemanfaatan Aset dengan komposisi perbandingan bobot kinerja masing-masing sebesar (50% : 25% : 25%). Adapun evaluasi dan analisis kinerja yang dicapai pada tahun 2023 untuk masing-masing indikator adalah sebagai berikut :

1) Prosentase OPD ketepatan waktu penyelesaian laporan BMD

Data Data dasar Jumlah OPD sebagai obyek yang dievaluasi atas ketepatan waktu pelaporan BMD adalah sebanyak 100 yang terdiri dari : 52 SKPD, 10 Bagian, 34 Puskesmas dan 4 Kelurahan. Adapun persentase OPD yang tepat waktu dalam penyampaian Laporan BMD tahun 2023 adalah 91%, Sehingga capaian Komponen A (Bobot



Persentase OPD ketepatan waktu penyelesaian laporan BMD) = **50 %**
x 91 % = 45,5%

2) Persentase Peningkatan Capaian Sertipikat Aset Daerah

Data dasar persentase peningkatan capaian sertipikat aset daerah tahun 2023 sebesar = 43,01% sedangkan sertifikasi aset tahun 2022 sebesar = 37%. Adapun capaian Komponen B (Bobot Persentase capaian peningkatan sertipikat aset daerah) = **25% x 43,01% = 10,775%**

3) Persentase Peningkatan Capaian Pemanfaatan BMD

Data dasar Persentase peningkatan capaian pemanfaatan aset daerah tahun 2023 sebesar 84,65 % sedang pemanfaatan aset tahun 2022 sebesar = 70,40 % Adapun capaian Komponen C (Bobot Persentase capaian Pemanfaatan BMD) = **25% x 84,65 % = 21,163 %**.

Dalam hal ini indikator kinerja utama didukung 1 (satu) program, yaitu pada program Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan 3 (tiga) indikator program yang terformulasikan dalam perhitungan : IKU - Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah, sebagai berikut :

$$\text{IPA} = (\text{Bobot Komponen A}) + (\text{Bobot Komponen B}) + (\text{Bobot Komponen C})$$

$$\begin{aligned} &= (50\% \times 91\%) + (25\% \times 43,01\%) + (25\% \times 84,65\%) \\ &= (45,5\%) + (10,775\%) + (21,163\%) \\ &= \mathbf{77,44\%} \end{aligned}$$

Target capaian IPA -Pemerintah Kabupaten Jombang yang diampu oleh Kepala BPKAD pada tahun 2023 adalah sebesar **62,50%**, sedangkan realisasinya di tahun 2023 mencapai = **77,44 %**



Terkait dengan capaian indikator kinerja utama, dipengaruhi oleh keakuratan penyajian data barang milik daerah. Dalam rangka meningkatkan keakuratan data barang milik daerah, strategi yang diambil adalah melakukan optimalisasi pengelolaan barang milik daerah. Kebijakan yang diambil adalah melakukan inventarisasi, klasifikasi dan pengamanan barang milik daerah

Seperti diketahui, Pemberian opini merupakan bentuk apresiasi dari BPK atas hasil pemeriksaan laporan keuangan, disamping pemberian rekomendasi lainnya. Laporan keuangan yang disusun oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah merupakan media akuntabilitas keuangan yang disajikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat IPKD adalah satuan ukuran yang ditetapkan berdasarkan seperangkat dimensi dan indikator untuk menilai kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam periode tertentu. Aturan ini ditetapkan dalam Permendagri Nomor 19 Tahun 2020.

Pengukuran IPKD dilakukan dengan menjumlah seluruh hasil indeks dimensi. Sesuai Permendagri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah terdapat 6 dimensi, bobot dan mekanisme penilaian pengukuran IPKD. Dimensi 1 tentang kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran, dimensi 2 tentang pengalokasian anggaran belanja dalam APBD, dimensi 3 menyangkut transparansi pengelolaan keuangan daerah, dimensi 4 tentang penyerapan anggaran, dimensi 5 tentang kondisi keuangan daerah, serta dimensi 6 menyangkut opini BPK atas LKPD.

Target IPKD yang dirumuskan BPKAD dirumuskan non sektor pendapatan sehingga komponen kondisi keuangan daerah tidak dimasukkan dalam komponen perhitungan. Selain itu pada dimensi 1 tentang kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran, komponen kesesuaian RPJMD dan RKPD tidak dihitung.



Sehingga hasil pengukuran IPKD sebagaimana tabel berikut ini :

No	Dimensi	Indeks	Total Indeks (IPKD)
1.	Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran	12	$= D.1 + D.2 + D.3 + D.4 + D.5 + D.6$ $= 12 + 20 + 15 + 20 + 15$ $= 82$
2.	Pengalokasian anggaran belanja dalam APBD	20	
3.	Transparansi pengelolaan keuangan	15	
4.	Penyerapan anggaran	20	
5.	Opini BPK	15	

IPKD Provinsi diukur oleh Menteri melalui Kepala Balitbang sedangkan IPKD Kabupaten/Kota diukur oleh Gubernur. Kemendagri telah mengembangkan aplikasi untuk pengukuran IPKD Provinsi dan Kabupaten. SKPD terkait agar melakukan input di aplikasi sesuai dengan tupoksi masing-masing. Kemendagri akan memberikan reward dan punishment atas kinerja pengelolaan keuangan daerah.

Hasil Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah untuk Kabupaten Jombang lebih rendah dibandingkan dengan IPKD Kabupaten Paser untuk Tahun Anggaran 2023. Namun hal tersebut tidak dapat tersebut kurang sesuai untuk dijadikan tolak ukur atau benchmark karena terdapat dimensi pengukuran yang dihitung melibatkan komponen pendapatan, sehingga tidak dapat dihitung oleh BPKAD Kabupaten Jombang. Perbandingan Hasil pengukuran IPKD untuk Kabupaten terbaik pada klaster yang sama yaitu Kabupaten Paser dibandingkan dengan hasil pengukuran IPKD yang dihitung oleh BPKAD Kabupaten Jombang dapat dilihat pada tabel berikut :

IPKD Kabupaten Paser	No	IPKD BPKAD	
		Dimensi	Indeks
82,649	1.	Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran	10,09
	2.	Pengalokasian anggaran belanja dalam APBD	20





IPKD Kabupaten Paser	No	IPKD BPKAD	
		Dimensi	Indeks
	3.	Transparansi pengelolaan keuangan	15
	4.	Penyerapan anggaran	15
	5.	Opini BPK	15
		Jumlah	75,09

Indeks Pengelolaan Aset Daerah adalah sebagai ukuran pengelolaan aset/BMD pada sisi pengguna barang. IPA menjadi satu bagian pengukuran dari area perubahan reformasi birokrasi pada penatalaksanaan yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses dan prosedur kerja. Sejauh ini belum ada Permendagri yang mengampu perhitungan Indeks Pengamanan Aset (IPA) untuk Pemerintah Daerah. Standar IPA yang sudah baku hanya berlaku di Kementerian/Lembaga mengacu pada KMK nomor 127/KM.6/2022.

Hasil Pengukuran IPA sebagaimana tabel berikut:

No	Dimensi	Indeks	Total Indeks (IPKD)
1.	Persentase OPD yang Tepat Waktu Pelaporan BMD	50	$= D.1 + D.2 + D.3$ $= 50 + 25 + 25$ $= 100$
2.	Persentase Peningkatan Capaian Sertifikasi Aset	25	
3.	Persentase Peningkatan Capaian Pemanfaatan Aset	25	

Tidak dapat ditemukan capaian atas nilai Indeks Pengelolaan Aset Daerah secara nasional karena tidak adanya Peraturan yang menjadi standar atas perhitungan IPA pada Pemerintah Daerah. IPA Kota Denpasar berada di nilai 96,32 pada tahun 2022. Namun hal tersebut kurang sesuai untuk dijadikan tolak ukur atau benchmark karena masing-masing daerah memiliki indikator pengukuran yang tidak sama. Perbandingan dapat dilihat sebagaimana berikut:



IPA KOTA DENPASAR	No	IPKD BPKAD	
		Dimensi	Indeks
96,32	1.	Prosentase OPD yang menyusun Laporan BMD Tepat Waktu	45,5
	2.	Peningkatan capaian pemanfaatan aset	10.775
	3.	Peningkatan aset daerah yang bersertifikat	21,163
	Jumlah		77,44

Tabel 3.2
Perbandingan Realisasi Kinerja

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi				
			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
Mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	74,50	n/a	n/a	76,09	75,09	76,721
	Indeks Pengelolaan Barang Milik daerah	62.50	n/a	n/a	57,08	56,22	77,44
Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Prosentase penunjang urusan pemerintah daerah yang disusun sesuai aturan	80,30	n/a	n/a	80,34	80,48	82,48

Tabel 3.3.
Perbandingan Realisasi Kinerja s/d Akhir Periode RPJMD/RENSTRA

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD/RENSTRA	Realisasi	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5
Mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	74,50	76,721	2,98%
	Indeks Pengelolaan Barang Milik daerah	62,50	77,44	23,90%
Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Prosentase penunjang urusan pemerintah daerah yang disusun sesuai aturan	80,30	82,48	2,71%

Khusus terhadap LKPD, masih terkait dengan pengelolaan kas, persediaan, investasi permanen dan nonpermanen, serta secara mayoritas disebabkan karena pengelolaan aset tetap yang belum akuntabel. Permasalahan aset tetap Pemerintah Daerah pada umumnya terkait adanya barang milik daerah (BMD) tidak dicatat, BMD yang tidak ada justru masih dicatat, BMD dicatat tapi tidak didukung dengan dokumen kepemilikan yang sah. Kelemahan sistemik merupakan bawaan dari masa lalu yang memposisikan pengelolaan BMD tidak lebih penting dibanding pengelolaan uang. Penyebab lainnya karena pola pikir OPD yang lebih sering membeli daripada memelihara. Kondisi ini berlangsung bertahun-tahun terakumulasi sehingga menjadi permasalahan kronis yang harus segera ditangani oleh Kepala Daerah supaya bisa ikut andil dalam perburuan opini WTP.

Beberapa faktor pendorong pencapaian kinerja sasaran penyusunan laporan keuangan daerah yang sesuai SAP dan tepat waktu yang ditindaklanjuti adalah:

- Dukungan dan kerja sama dari seluruh SKPD yang menghasilkan Laporan Keuangan SKPD



- Dukungan dan kerjasama dalam bentuk aplikasi SIMDA dengan BPKP Provinsi Jawa Timur
- Adanya pelaksanaan review Inspektorat yang menyempurnakan LKPD
- Dukungan dari Bidang asset yang menangani jumlah asset tetap di neraca sebagai komponen LKPD

Guna optimalisasi pencapaian kinerja sasaran Ketepatan waktu dalam Penyusunan APBD maka beberapa faktor penghambat yang muncul perlu segera ditangani dengan upaya:

1. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait baik di lingkup Pemerintah Kabupaten Jombang maupun Pemerintah Pusat dan Provinsi.
2. Meningkatkan kualitas SDM di lingkup internal bidang dengan mengikuti sosialisasi maupun mengikutsertakan rapat-rapat baik dengan kementerian terkait maupun Pemerintah Provinsi .
3. Berupaya melakukan pendampingan kepada OPD selaku *stakeholder* pada bidang anggaran agar pada saat penyusunan konsolidasi atas anggaran dapat dilakukan dengan tepat waktu dan sesuai aturan perundang-undangan.

Opini WTP yang diperoleh bukan hasil instan, tetapi melalui proses terstruktur dengan mengedepankan pembenahan fungsi dan sistem pengendalian intern. Dengan diperolehnya opini WTP oleh Pemerintah Kabupaten Jombang membuktikan telah terstrukturnya laporan keuangan yang sinkron dengan pencatatan BMD dalam Laporan Keuangan Daerah. Dimulai dari penganggaran yang sinkron dengan RPJMD hingga pelaksanaan sosialisasi dan bimbingan teknis bagi OPD agar pelaksana ditingkat OPD memiliki pemahaman yang lebih baik.

Tabel 3.4.
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1.	Mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	100	98,01	1,99%
		Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah	100	96,00	4,00%
2.	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Prosentase penunjang urusan pemerintah daerah yang disusun sesuai aturan	100	98,18	1,82%

Upaya – upaya yang sudah dilakukan untuk mewujudkan capaian kinerja diatas antara lain :

1. Menyusun Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Jombang yang sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)
2. Menyusun dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) yang akhirnya disahkan hingga menjadi Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah (DKBMD) yang menjadi dasar acuan bagi validnya data aset di Kabupaten Jombang.
3. Menyusun Standar Satuan Harga (SSH) yang menjadi dasar perencanaan anggaran di Kabupaten Jombang.
4. Pemutakhiran Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah dan Sistem Informasi Pengelolaan Aset Daerah.
5. Revisi pada sistem akuntansi dan kebijakan akuntansi sesuai dengan perundangan yang berlaku.
6. Tertib administrasi penatausahaan dan pelaporan keuangan daerah.



Tabel 3.5 Kebutuhan Pegawai
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN JOMBANG

No	Kode Jabatan	Nama Jabatan	Atasan Jabatan	Tipe	Kelas	Jml Pegawai	Kebutuhan Pegawai	Selisi h
1	28-00 0002	SEKRETARIAT	KEPALA BADAN	STRUK TURAL	12	1 Orang	1 Orang	0 Orang
2	28-00 0004	BIDANG ANGGARAN	KEPALA BADAN	STRUK TURAL	11	1 Orang	1 Orang	0 Orang
3	28-00 0005	BIDANG AKUNTANSI DAN PERBENDAHARAA N	KEPALA BADAN	STRUK TURAL	11	1 Orang	1 Orang	0 Orang
4	28-00 0006	BIDANG ASET	KEPALA BADAN	STRUK TURAL	11	1 Orang	1 Orang	0 Orang
5	28-00 0007	Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Keuangan dan Aset	SEKRETARIAT	STRUK TURAL	9	1 Orang	1 Orang	0 Orang
6	28-00 0008	Sub Bagian Penyusunan Program dan Evaluasi	SEKRETARIAT	STRUK TURAL	9	0 Orang	1 Orang	-1 Orang
7	28-00 0001	KEPALA BADAN	BIDANG ANGGARAN	STRUK TURAL	14	1 Orang	1 Orang	0 Orang
8	28-00 0009	Sub Bidang Perencanaan Anggaran	BIDANG ANGGARAN	STRUK TURAL	9	1 Orang	1 Orang	0 Orang
9	28-00 0010	Sub Bidang Pelaksanaan dan Evaluasi Anggaran	BIDANG ANGGARAN	STRUK TURAL	9	1 Orang	1 Orang	0 Orang
10	28-00 0011	Sub Bidang Pengelolaan Data Informasi Keuangan	BIDANG ANGGARAN	STRUK TURAL	9	1 Orang	1 Orang	0 Orang
11	28-00 0012	Sub Bidang Akuntansi	BIDANG AKUNTANSI DAN PERBENDAHARAA N	STRUK TURAL	9	1 Orang	1 Orang	0 Orang
12	28-00 0013	Sub Bidang Penerimaan Kas Daerah	BIDANG AKUNTANSI DAN PERBENDAHARAA N	STRUK TURAL	9	0 Orang	1 Orang	-1 Orang
13	28-00 0014	Sub Bidang Pengeluaran Kas Daerah	BIDANG AKUNTANSI DAN PERBENDAHARAA N	STRUK TURAL	9	1 Orang	1 Orang	0 Orang



No	Kode Jabatan	Nama Jabatan	Atasan Jabatan	Tipe	Kelas	Jml Pegawai	Kebutuhan Pegawai	Selisi h
14	28-00 0015	Sub Bidang Analisis Kebutuhan dan Perencanaan	BIDANG ASET	STRUKTURAL	9	1 Orang	1 Orang	0 Orang
15	28-00 0016	Sub Bidang Penatausahaan dan Sistem Informasi	BIDANG ASET	STRUKTURAL	9	1 Orang	1 Orang	0 Orang
17	28-00 0018	Analisis Pengelolaan Kekayaan Daerah	Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Keuangan dan Aset	PELAKSANA	7	1 Orang	1 Orang	0 Orang
18	28-00 0022	Analisis Hibah Daerah	Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Keuangan dan Aset	PELAKSANA	7	0 Orang	1 Orang	-1 Orang
19	28-00 0024	Pengelola Surat	Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Keuangan dan Aset	PELAKSANA	6	2 Orang	2 Orang	0 Orang
20	28-00 0025	Pengolah Daftar Gaji	Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Keuangan dan Aset	PELAKSANA	6	0 Orang	1 Orang	-1 Orang
21	28-00 0026	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Keuangan dan Aset	PELAKSANA	6	1 Orang	1 Orang	0 Orang
22	28-00 0027	Pengemudi	Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Keuangan dan Aset	PELAKSANA	3	0 Orang	1 Orang	-1 Orang
23	28-00 0039	Analisis Laporan Pertanggungjawaban Bendahara	Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Keuangan dan Aset	PELAKSANA	7	0 Orang	1 Orang	-1 Orang
24	28-00 0042	Bendahara	Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Keuangan dan Aset	PELAKSANA	7	0 Orang	1 Orang	-1 Orang
25	28-00 0062	Analisis Pelaporan dan Transaksi Keuangan	Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Keuangan dan Aset	PELAKSANA	7	1 Orang	1 Orang	0 Orang
26	28-00 0063	Petugas Keamanan	Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Keuangan dan Aset	PELAKSANA	3	0 Orang	1 Orang	-1 Orang



No	Kode Jabatan	Nama Jabatan	Atasan Jabatan	Tipe	Kelas	Jml Pegawai	Kebutuhan Pegawai	Selisi h
27	28-00 0064	Pengadministrasi Kepegawaian	Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Keuangan dan Aset	PELAKSANA	5	0 Orang	1 Orang	-1 Orang
28	28-00 0065	Pengadministrasi Umum	Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Keuangan dan Aset	PELAKSANA	5	1 Orang	1 Orang	0 Orang
29	28-00 0071	Arsiparis Terampil	Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Keuangan dan Aset	FUNGSIONAL		0 Orang	1 Orang	-1 Orang
30	28-00 0038	Analisis Rencana Program dan Kegiatan	Sub Bagian Penyusunan Program dan Evaluasi	PELAKSANA	7	0 Orang	1 Orang	-1 Orang
31	28-00 0061	Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran	Sub Bagian Penyusunan Program dan Evaluasi	PELAKSANA	7	1 Orang	2 Orang	-1 Orang
32	28-00 0067	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	Sub Bagian Penyusunan Program dan Evaluasi	PELAKSANA	5	0 Orang	1 Orang	-1 Orang
33	28-00 0069	Analisis Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	Sub Bagian Penyusunan Program dan Evaluasi	PELAKSANA	7	0 Orang	1 Orang	-1 Orang
34	28-00 0073	Pengelola Keuangan	Sub Bagian Penyusunan Program dan Evaluasi	PELAKSANA	6	1 Orang	1 Orang	0 Orang
35	28-00 0033	Pengolah Data Bimbingan Teknis Anggaran	Sub Bidang Perencanaan Anggaran	PELAKSANA	6	1 Orang	1 Orang	0 Orang
36	28-00 0040	Analisis Pelaksanaan Anggaran	Sub Bidang Perencanaan Anggaran	PELAKSANA	7	0 Orang	1 Orang	-1 Orang
37	28-00 0043	Analisis Perencanaan Anggaran	Sub Bidang Perencanaan Anggaran	PELAKSANA	7	1 Orang	2 Orang	-1 Orang
38	28-00 0060	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	Sub Bidang Perencanaan Anggaran	PELAKSANA	5	0 Orang	1 Orang	-1 Orang
39	28-00 0066	Pengolah Data Perencanaan Penganggaran	Sub Bidang Perencanaan Anggaran	PELAKSANA	6	1 Orang	4 Orang	-3 Orang





No	Kode Jabatan	Nama Jabatan	Atasan Jabatan	Tipe	Kelas	Jml Pegawai	Kebutuhan Pegawai	Selisi h
40	28-00 0041	Analisis Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran	Sub Bidang Pelaksanaan dan Evaluasi Anggaran	PELAKSANA	7	1 Orang	1 Orang	0 Orang
41	28-00 0044	Pengolah Data Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran	Sub Bidang Pelaksanaan dan Evaluasi Anggaran	PELAKSANA	6	1 Orang	2 Orang	-1 Orang
42	28-00 0059	Pengadministrasian Anggaran	Sub Bidang Pelaksanaan dan Evaluasi Anggaran	PELAKSANA	5	0 Orang	1 Orang	-1 Orang
43	28-00 0032	Pengolah Data Sistem Informasi Pelaksanaan Anggaran	Sub Bidang Pengelolaan Data Informasi Keuangan	PELAKSANA	6	1 Orang	1 Orang	0 Orang
44	28-00 0057	Analisis Data dan Informasi	Sub Bidang Pengelolaan Data Informasi Keuangan	PELAKSANA	7	0 Orang	1 Orang	-1 Orang
45	28-00 0058	Pengadministrasian Keuangan	Sub Bidang Pengelolaan Data Informasi Keuangan	PELAKSANA	5	0 Orang	1 Orang	-1 Orang
46	28-00 0035	Analisis Aplikasi dan Pengelolaan Data Sistem Keuangan	Sub Bidang Akuntansi	PELAKSANA	7	0 Orang	1 Orang	-1 Orang
47	28-00 0036	Analisis Laporan Keuangan	Sub Bidang Akuntansi	PELAKSANA	7	1 Orang	2 Orang	-1 Orang
48	28-00 0055	Pengadministrasian Keuangan	Sub Bidang Akuntansi	PELAKSANA	5	0 Orang	1 Orang	-1 Orang
49	28-00 0056	Pengelola Laporan Keuangan Daerah	Sub Bidang Akuntansi	PELAKSANA	6	2 Orang	4 Orang	-2 Orang
50	28-00 0074	Pengelola Keuangan	Sub Bidang Akuntansi	PELAKSANA	6	1 Orang	1 Orang	0 Orang
51	28-00 0023	Analisis Perbendaharaan	Sub Bidang Penerimaan Kas Daerah	PELAKSANA	7	2 Orang	2 Orang	0 Orang
52	28-00 0053	Pengadministrasian Keuangan	Sub Bidang Penerimaan Kas Daerah	PELAKSANA	5	0 Orang	1 Orang	-1 Orang



No	Kode Jabatan	Nama Jabatan	Atasan Jabatan	Tipe	Kelas	Jml Pegawai	Kebutuhan Pegawai	Selisi h
53	28-00 0054	Pengolah Data Laporan Keuangan	Sub Bidang Penerimaan Kas Daerah	PELAKSANA	6	1 Orang	2 Orang	-1 Orang
54	28-00 0031	Pengelola Data Belanja dan Laporan Keuangan	Sub Bidang Pengeluaran Kas Daerah	PELAKSANA	6	1 Orang	2 Orang	-1 Orang
55	28-00 0034	Analisis Transaksi Keuangan	Sub Bidang Pengeluaran Kas Daerah	PELAKSANA	7	0 Orang	2 Orang	-2 Orang
56	28-00 0052	Pengadministrasi Keuangan	Sub Bidang Pengeluaran Kas Daerah	PELAKSANA	5	0 Orang	1 Orang	-1 Orang
57	28-00 0068	Analisis Pelaporan dan Transaksi Keuangan	Sub Bidang Pengeluaran Kas Daerah	PELAKSANA	7	1 Orang	2 Orang	-1 Orang
58	28-00 0070	Pengolah Daftar Gaji	Sub Bidang Pengeluaran Kas Daerah	PELAKSANA	6	1 Orang	2 Orang	-1 Orang
59	28-00 0072	Pranata Komputer Terampil	Sub Bidang Pengeluaran Kas Daerah	FUNGSIONAL		0 Orang	1 Orang	-1 Orang
60	28-00 0076	Pranata Komputer Pertama	Sub Bidang Pengeluaran Kas Daerah	FUNGSIONAL		0 Orang	1 Orang	-1 Orang
61	28-00 0029	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	Sub Bidang Analisis Kebutuhan dan Perencanaan	PELAKSANA	5	0 Orang	1 Orang	-1 Orang
62	28-00 0050	Analisis Aset Daerah	Sub Bidang Analisis Kebutuhan dan Perencanaan	PELAKSANA	7	0 Orang	2 Orang	-2 Orang
63	28-00 0051	Pengolah Data	Sub Bidang Analisis Kebutuhan dan Perencanaan	PELAKSANA	6	0 Orang	1 Orang	-1 Orang
64	28-00 0030	Pengolah Data Pengelolaan Kekayaan Negara	Sub Bidang Penatausahaan dan Sistem Informasi	PELAKSANA	6	0 Orang	2 Orang	-2 Orang
65	28-00 0047	Pranata Teknologi Informasi Komputer	Sub Bidang Penatausahaan dan Sistem Informasi	PELAKSANA	5	0 Orang	1 Orang	-1 Orang



No	Kode Jabatan	Nama Jabatan	Atasan Jabatan	Tipe	Kelas	Jml Pegawai	Kebutuhan Pegawai	Selisi h
66	28-00 0048	Pengelola Data Rekonsiliasi	Sub Bidang Penatausahaan dan Sistem Informasi	PELAKSANA	6	1 Orang	8 Orang	-7 Orang
67	28-00 0049	Analisis Data dan Informasi	Sub Bidang Penatausahaan dan Sistem Informasi	PELAKSANA	7	2 Orang	2 Orang	0 Orang
68	28-00 0037	Analisis Aset Negara	Sub Bidang Pengelolaan dan Pengendalian	PELAKSANA	7	0 Orang	1 Orang	-1 Orang
69	28-00 0045	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	Sub Bidang Pengelolaan dan Pengendalian	PELAKSANA	6	2 Orang	5 Orang	-3 Orang
70	28-00 0046	Analisis Aset Daerah	Sub Bidang Pengelolaan dan Pengendalian	PELAKSANA	7	2 Orang	2 Orang	0 Orang
71	28-00 0075	Pengelola Keuangan	Sub Bidang Pengelolaan dan Pengendalian	PELAKSANA	6	0 Orang	6 Orang	-6 Orang
Jumlah					45	108	-63	

Jumlah pegawai pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang sampai dengan akhir Desember 2022 sebanyak 45 orang Aparatur Sipil Negara (ASN). Kondisi ini belum sesuai dengan jumlah pegawai yang dibutuhkan berdasarkan analisis beban kerja yakni sebanyak 108 ASN dengan tingkat capaian pemenuhan SDM sejumlah 41,67%. Dari data tersebut masih terdapat kekurangan pegawai sebanyak 63 ASN. Namun demikian, BPKAD dengan jumlah pegawai yang ada mampu mencapai sasaran dengan rata-rata capaian dari dua sasaran strategis sebesar 100%.

Kondisi *existing* sumber daya manusia dengan jumlah yang lebih rendah ini menjadi tantangan dalam pelaksanaan kinerja OPD, namun hal tersebut tidak menjadi hambatan dalam pencapaian sasaran kinerja. Hal ini terbukti tercapainya efisiensi sumber daya manusia sebesar 58,33%.



**Tabel 3.6 Kebutuhan Sarana dan Prasarana
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN JOMBANG**

Kode Barang	Nama Barang	Jabatan Pengguna Barang	Type Barang	Jumlah Barang	Kebutuhan Barang
02.10.01.02.003	Laptop	Kepala BPKAD	HP Pav X360 14-dh TX	1	1
02.10.01.02.003	Notebook	Sekretaris	Dell Inspiron 5410	1	1
02.10.02.03.003	Printer	Sekretaris	Epson L5290	1	1
02.10.01.02.001	PC Unit	Kepala Sub Bagian Umum Kepegawaian Keuangan da Aset	Dell Inspiron 3670	1	1
02.10.02.03.003	Printer	Kepala Sub Bagian Umum Kepegawaian Keuangan da Aset	Epson/L3110	1	1
02.10.01.02.002	Laptop	Kepala Sub Bagian Umum Kepegawaian Keuangan da Aset	HP Envy X360 14-BF0042TU	1	1
02.10.01.02.001	PC Unit	Penyusun Rencana Kediatan dan Anggaran	Dell Inspiron 3670	1	1
02.10.02.03.003	Printer	Penyusun Rencana Kediatan dan Anggaran	Brother MFC T920W	1	1
02.10.02.03.003	Printer	Penyusun Rencana Kediatan dan Anggaran	Epson LQ 2190	1	1
02.10.01.02.001	PC Unit	Analisis Pengelolaan Kekayaan Daerah	Dell Inspiron 3891MT + Led 27 inch	1	1
02.10.02.03.003	Printer	Analisis Pengelolaan Kekayaan Daerah	Epson / L3110	1	1
02.10.01.02.003	Notbook	Analisis Pengelolaan Kekayaan Daerah	Lenovo Yoga 520-141KB	1	1
02.10.01.02.001	PC Unit	Pengelola Keuangan	HP Pav Slimline Series P6-2342L	1	1
02.10.01.02.002	Laptop	Pengelola Keuangan	HP Envy X360 14-BF0042TU	1	1



Kode Barang	Nama Barang	Jabatan Pengguna Barang	Tipe Barang	Jumlah Barang	Kebutuhan Barang
02.10.02.03.003	Printer	Pengelola Keuangan	Brother T710W	1	1
02.10.01.02.002	Laptop	Pengadministrasi Umum	HP Pav X360 14-dh TX	1	1
02.10.01.02.001	PC Unit	Pengelola Surat	Dell Inspiron 3670	1	1
02.10.02.03.003	Printer	Pengelola Surat	Epson LQ 2190	1	1
02.10.01.02.001	PC Unit	Analisis Pelaporan Dan Transaksi Keuangan	Acer Aspire M 1641	1	1
02.10.02.03.003	Printer	Analisis Pelaporan Dan Transaksi Keuangan	Brother MFC J3720 A3	1	1
02.10.01.02.002	Laptop	Analisis Pelaporan Dan Transaksi Keuangan	Lenovo G400/Intel Core i3	1	1
02.10.01.02.003	Notbook	Kepala Bidang Aset	HP Intel Core i7	1	1
02.10.01.02.003	Notbook	Kepala Sub Bidang Pengelolaan Dan Pengendalian	HP Intel core i7	1	1
02.03.03.21.001	Alat Ukur Lainnya	Kepala Sub Bidang Pengelolaan Dan Pengendalian	Laser Meter/100 meter	1	1
02.03.03.21.001	Alat Ukur Lainnya	Kepala Sub Bidang Pengelolaan Dan Pengendalian	Laser Meter/100 meter	1	1
02.03.03.09.018	Alat Ukur Lain-Lainnya	Kepala Sub Bidang Pengelolaan Dan Pengendalian	Leica Geosystems Distro/DS	1	1
02.03.03.21.001	Alat Ukur Lain-Lainnya	Kepala Sub Bidang Pengelolaan Dan Pengendalian	Meteran Dorong Digital	1	1
02.03.03.21.001	Alat Ukur Lain-Lainnya	Kepala Sub Bidang Pengelolaan Dan Pengendalian	Meteran Tancap Tanah	1	1
02.05.02.06.021	Camera Video	Kepala Sub Bidang Pengelolaan Dan Pengendalian	Canon/EOS 1500D 18-55mm lens	1	1
02.10.01.02.001	PC Unit	Kasub Bid. Penatausahaan dan Sistem Informasi	Dell Inspiron/3650MT	1	1



Kode Barang	Nama Barang	Jabatan Pengguna Barang	Tipe Barang	Jumlah Barang	Kebutuhan Barang
02.10.01.02.003	Notbook	Kasub Bid. Penatausahaan dan Sistem Informasi	HP Pav X360 14-dh TX	1	1
02.05.02.06.021	Camera Video	Kasub Bid. Penatausahaan dan Sistem Informasi	Canon / EOS M100 15-45 lens	1	1
02.10.01.02.001	PC Unit	Penilai Pemerintah Ahli Muda	Asus / K31AD	1	1
02.10.02.03.003	Printer	Penilai Pemerintah Ahli Muda	Epson / L3110	1	1
02.10.01.02.003	Notbook	Penilai Pemerintah Ahli Muda	Inspiron 5410	1	1
02.10.01.02.001	PC Unit	Pengelola Keuangan	Asus / Cm 673 core i5	1	1
02.10.02.03.002	Monitor	Pengelola Keuangan	Acer / 27 inch	1	1
02.10.01.02.001	PC Unit	Analisis Data Dan Informasi	Dell / 3874 Intel core i5	1	1
02.10.02.03.003	Printer	Analisis Data Dan Informasi	HP M12w / Laserjet	1	1
02.10.01.02.001	PC Unit	Analisis Aset Daerah	Dell Optiplex 390 MT	1	1
02.10.02.03.003	Printer	Analisis Aset Daerah	Epson L565	1	1
02.10.01.02.001	PC Unit	Pengelola Data Rekonsiliasi	Dell Inspiron / 3891MT	1	1
02.10.02.03.003	Printer	Pengelola Data Rekonsiliasi	Epson L120	1	1
02.10.01.02.003	Notbook	Pengelola Data Rekonsiliasi	Lenovo Thinkpad Twist / S239U 6CA	1	1
02.10.01.02.001	PC Unit	Pengelola Pemanfaatan Barang milik daerah	Acer Aspire / TC-605 intel core 13 4150-3.5 Ghz	1	1
02.10.01.02.001	PC Unit	Analisis Aset Daerah	Asus / Cm 673 core i5	1	1
02.10.02.03.003	Printer	Analisis Aset Daerah	Epson Inkjet Color All in One L1455	1	1
02.10.01.02.001	PC Unit	Pengolah Data Pengelolaan Kekayaan Negara	Dell Inspiron / 3891MT	1	1



Kode Barang	Nama Barang	Jabatan Pengguna Barang	Tipe Barang	Jumlah Barang	Kebutuhan Barang
02.10.02.03.003	Printer	Pengolah Data Pengelolaan Kekayaan Negara	HP M12w / Laserjet	1	1
02.10.01.02.002	Laptop	Kepala Bidang Anggaran	HP Pav X360 14-dh TX	1	1
02.10.02.03.003	Printer	Kepala Bidang Anggaran	Epson L210	1	1
02.10.01.02.001	PC Unit	Kasubbid Perencanaan Anggaran	MSI Pro AP242	1	1
02.10.01.02.002	Laptop	Kasubbid Perencanaan Anggaran	HP 13 Envy AD004TX	1	1
02.10.02.03.003	Printer	Kasubbid Perencanaan Anggaran	Brother MFC-T920DW	1	1
02.10.01.02.001	PC Unit	Analisis Keuangan Pusat Atau Daerah Ahli Muda	Dell Inspiron / 3891MT	1	1
02.10.02.03.002	Monitor	Analisis Keuangan Pusat Atau Daerah Ahli Muda	Acer / 27 inch	1	1
02.10.01.02.001	PC Unit	Pengolah Data Perencanaan Penganggaran	MSI Pro AP242	1	1
02.10.02.03.003	Printer	Pengolah Data Perencanaan Penganggaran	Brother MFC-J200	1	1
02.10.01.02.001	PC Unit	Analisis Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran	Dell Inspiron 3650 MT	1	1
02.10.02.03.004	Scanner	Analisis Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran	Plustek smart office PS456U	1	1
02.10.01.02.003	Notbook	Analisis Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran	HP /X360	1	1
02.10.01.02.001	PC Unit	Pengolah Data Bimbingan Teknis Anggaran	Dell Inspiron 3650 MT	1	1
02.10.01.02.001	PC Unit	Pengolah Data Sistem Informasi Pelaksanaan Anggaran	Dell Inspiron 3650 MT	1	1
02.10.01.02.002	Laptop	Pengolah Data Sistem Informasi Pelaksanaan Anggaran	HP Intel Core i7	1	1





Kode Barang	Nama Barang	Jabatan Pengguna Barang	Tipe Barang	Jumlah Barang	Kebutuhan Barang
02.10.01.02.001	PC Unit	Pengolah Data Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran	MSI Pro AP242	1	1
02.10.01.02.002	Laptop	Pengolah Data Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran	HP 13 Envy AD004TX	1	1
02.10.02.03.003	Printer	Pengolah Data Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran	MFC-T920DW	1	1
02.10.01.02.001	PC Unit	Analisis Perencanaan Anggaran	Dell Studio XPS 8700	1	1
02.10.02.03.003	Printer	Analisis Perencanaan Anggaran	HP Laserjet Pro M402dn	1	1
02.10.01.02.002	Laptop	Kasubbid Pelaksanaan Dan Evaluasi Anggaran	HP Pav X360 14-dh TX	1	1
02.10.02.03.003	Printer	Kasubbid Pelaksanaan Dan Evaluasi Anggaran	HP M4002DN	1	1
02.10.02.03.003	Printer	Kasubbid Pelaksanaan Dan Evaluasi Anggaran	Epson L210	1	1
02.10.01.02.001	PC Unit	Kepala Bidang Akuntansi Dan Perbendaharaan	Acer Aspire / TC-605	1	1
02.10.01.02.003	Notbook	Kepala Bidang Akuntansi Dan Perbendaharaan	HP / X360	1	1
02.10.02.03.003	Printer	Kepala Bidang Akuntansi Dan Perbendaharaan	HP Laserjet P1102	1	1
02.10.01.02.001	PC Unit	Kasubbid Akuntansi	Dell Inspiron 3650 MT	1	1
02.10.01.02.002	Laptop	Kasubbid Akuntansi	HP 13-B203TU	1	1
02.10.01.02.001	PC Unit	Kasubbid Pengeluaran Kas Daerah	Dell Inspiron 3670MT	1	1
02.10.01.02.003	Notbook	Kasubbid Pengeluaran Kas Daerah	Lenovo G400/Intel Core i3	1	1



Kode Barang	Nama Barang	Jabatan Pengguna Barang	Tipe Barang	Jumlah Barang	Kebutuhan Barang
02.10.01.02.001	PC Unit	Pengelola Data Laporan Keuangan	Dell Inspiron 3670 MT	1	1
02.10.02.03.003	Printer	Pengelola Data Laporan Keuangan	MFC-940 CDN	1	1
02.10.02.03.003	Printer	Analisis Pelaporan Dan Transaksi Keuangan	HP Laserjet M107A	1	1
02.10.01.02.001	PC Unit	Analisis Perbendaharaan	HP Pav P6-23421	1	1
02.10.02.03.003	Printer	Analisis Perbendaharaan	Canon MX 497	1	1
02.10.01.02.001	PC Unit	Analisis Laporan Keuangan	Dell Inspiron 3650 MT	1	1
02.10.02.03.003	Printer	Analisis Laporan Keuangan	HP Laserjet M12w	1	1
02.10.01.02.001	PC Unit	Pengelola Laporan Keuangan Daerah	Dell Inspiron 3891 MT	1	1
02.10.01.02.001	PC Unit	Pengelola Keuangan	Dell Inspiron 3891 MT	1	1
02.10.01.02.001	PC Unit	Pengolah Daftar Gaji	Lenovo Edge 72	1	1
02.10.01.02.001	PC Unit	Pengolah Daftar Gaji	Acer a Aspire	1	1
02.10.01.02.003	Notebook	Pengolah Daftar Gaji	Dell Inspiron 14z 5423	1	1
02.10.01.02.003	Notebook	Pengolah Daftar Gaji	HP Intel Core i7	1	1
02.10.02.03.003	Printer	Pengolah Daftar Gaji	HP Lasejet MFP 179fnw Color	1	1
02.10.01.02.001	PC Unit	Pengelola Laporan Keuangan Daerah	Dell Inspiron 3891 MT	1	1
02.10.02.03.003	Printer	Pengelola Laporan Keuangan Daerah	HP Laserjet P1102w	1	1
02.10.01.02.001	PC Unit	Analisis Perbendaharaan	HP 110-0101 Intel Pentium Dual Core	1	1
02.10.01.02.001	PC Unit	Tenaga Administrasi Keuangan	Dell Optiplex 390 MT	1	1



Kode Barang	Nama Barang	Jabatan Pengguna Barang	Tipe Barang	Jumlah Barang	Kebutuhan Barang
02.10.02.03.003	Printer	Tenaga Administrasi Keuangan	Epson LQ 2190	1	1
02.10.01.02.003	Notebook	Tenaga Administrasi Keuangan	HP 13-B203TU	1	1
Jumlah				98 Unit	98 Unit

Analisis atas efisiensi sumber daya adalah SDM yang mendukung dalam pencapaian sasaran Perangkat Daerah, dalam kondisi riil Sumber Daya Manusia yang kompeten di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kabupaten Jombang lebih sedikit dibandingkan jumlah standar kebutuhan pegawai yang tertera pada Analisis Jabatan. Dengan kondisi tersebut BPKAD Kabupaten Jombang mampu mencapai target dengan hasil maksimal dikarenakan penggunaan Sumber Daya yang efektif serta efisien. Selain itu, kinerja yang tercapai ditunjang dengan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan dalam mengelola sumber daya sesuai dengan mandat yang diterima melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang merupakan penjabaran dari sasaran melalui instrumen pertanggungjawaban secara periodik, yaitu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Capaian kinerja masing-masing indikator kinerja utama dari program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh BPKAD Kabupaten Jombang dalam 1 (satu) tahun anggaran, dapat diilustrasikan sebagai berikut:



Tabel 3.7
Capaian Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
BPKAD Kabupaten Jombang Tahun 2023

PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	KINERJA	
		TARGET	REALISASI
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Skor Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran	0,95	0,95
	Skor Kesesuaian pegalokasian anggaran belanja	1	1
	Skor transparansi pengelolaan keuangan daerah	0,84	0,84
	Skor penyerapan anggaran	0,75	0,75
	Skor Opini BPK atas LKPD	1	1
Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Prosentase Kesesuaian nomer-klatur program RKPD dan KUA-PPAS;	100	100
	Prosentase Kesesuaian nomer-klatur program KUA_PPAS dan APBD;	100	100
	Prosentase Kesesuaian pagu program RKPD dan KUA-PPAS; dan	90	90
	Prosentase Kesesuaian pagu program KUA-PPAS dan APBD.	83	83
	Tingkat ketepatan waktu penyampaian RAPBD dan RPAPBD ke DPRD tepat waktu	100	100
Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 dokumen	2 dokumen
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 dokumen	2 dokumen
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	100 dokumen	100 dokumen
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	120 dokumen	225 Dokumen
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi	100 dokumen	100 dokumen
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	120 dokumen	225 Dokumen
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	4 dokumen	4 dokumen
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	4 dokumen	4 dokumen
Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	1 dokumen	1 dokumen



PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	KINERJA	
		TARGET	REALISASI
Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	2 dokumen	2 dokumen
Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	2 dokumen	2 dokumen
Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	2 dokumen	2 dokumen
Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	75 orang	75 orang
Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Prosentase rata-rata deviasi belanja SKPD	20%	20%
Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	12 dokumen	12 dokumen
Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	11.000 SP2D	11.000 SP2D
Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	1 dokumen	1 dokumen
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	248 laporan	248 laporan
Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	4 dokumen	4 dokumen
Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	106 dokumen	106 dokumen
Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta	1 dokumen	1 dokumen



PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	KINERJA	
		TARGET	REALISASI
Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan		
Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Prosentase rata-rata realisasi belanja Bantuan Keuangan, BTT dan Dana Bagi Hasil	100%	100%
Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	12 laporan	12 laporan
Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	12 laporan	12 laporan
Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	12 laporan	12 laporan
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Prosentase OPD yang menyusun LK OPD tepat waktu	75%	75%
Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	12 laporan	12 laporan
Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	212 dokumen	212 dokumen
Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	12 laporan	12 laporan
Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	2 laporan	2 laporan
Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2 dokumen	2 dokumen
Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1 dokumen dan 2 coaching clinic	1 dokumen dan 2 coaching clinic



PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	KINERJA	
		TARGET	REALISASI
Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 dokumen dan 1 rapat	1 dokumen dan 1 rapat
Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	186 orang	186 orang
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Bobot persentase SKPD yang menyusun Laporan BMD tepat waktu	44%	46%
	Bobot Peningkatan capaian pemanfaatan aset	16%	21,16%
	Bobot Peningkatan capaian aset daerah yang bersertifikat	10,75%	10,75%
Pengelolaan Barang Milik Daerah	Prosentase OPD yang menyusun laporan BMD tepat waktu	88%	91,00%
	Prosentase pengelolaan aset yang dimanfaatkan	64%	84,65%
	Prosentase pengajuan sertifikasi aset daerah	43%	43,01%
	Prosentase aset daerah yang terinventarisasi dalam laporan BMD tematik tahunan	75%	102,39%
Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 dokumen	3 dokumen
Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 dokumen	1 dokumen
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 dokumen	2 dokumen
Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 dokumen	3 dokumen
Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	4 laporan	4 laporan
Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	1 laporan	1 laporan
Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	392 laporan	568 laporan
Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	10 laporan	11 laporan
Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	4 laporan	4 laporan
Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan,	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan,	50 dokumen	182 dokumen



PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	KINERJA	
		TARGET	REALISASI
Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah		
Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	4 laporan	4 laporan
Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	1 laporan	1 laporan
Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	100 orang	100 orang
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase penunjang urusan pemerintah daerah yang disusun sesuai aturan	100%	100%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase dokumen perencanaan dan laporan keuangan yang tersusun tepat waktu	100%	100%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	2 dokumen
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 laporan	5 laporan
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase penunjang kelancaran administrasi perkantoran	100%	100%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 bulan	12 bulan
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 dokumen	4 dokumen
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	20 laporan	20 laporan
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 laporan	18 laporan
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase penunjang kelancaran administrasi perkantoran	100%	100%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 paket	12 paket
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 paket	20 paket



PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	KINERJA	
		TARGET	REALISASI
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 paket	12 paket
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	50 paket	50 paket
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 paket	5 paket
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	10 dokumen	10 dokumen
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	12 laporan
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase sarana dan prasarana aparatur yang menunjang kinerja pelayanan	100%	100%
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 unit	2 unit
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase penunjang kelancaran administrasi perkantoran	100%	100%
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	12 laporan
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	12 laporan
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	12 laporan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase sarana dan prasarana aparatur yang menunjang kinerja pelayanan	100%	100%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	1 unit
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	26 unit	26 unit
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 gedung	1 gedung
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	20 unit	20 unit



Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui :

1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Program Pengelolaan Keuangan Daerah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran, kesesuaian pengalokasian anggaran belanja, transparansi pengelolaan keuangan daerah, penyerapan anggaran, dan opini BPK atas LKPD, yang dilaksanakan dengan kegiatan- kegiatan berikut:

1) Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah

Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kesesuaian nomenklatur program RKPD dan KUA-PPAS, kesesuaian nomenklatur program KUA-PPAS dan APBD, kesesuaian pagu program RKPD dan KUA-PPAS, kesesuaian pagu program KUA-PPAS dan APBD, serta tingkat ketepatan waktu penyampaian RAPBD dan RAPBD ke DPRD tepat waktu. Sasaran-sasaran tersebut dapat diwujudkan dengan sub kegiatan berikut:

a. Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai arahan kebijakan umum di bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dalam rangka penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2024. Sedangkan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024 berisi tentang Rencana Pendapatan dan Pembiayaan Kabupaten Jombang, Prioritas Belanja Daerah, Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan, program/kegiatan/sub kegiatan dan rencana pembiayaan daerah. Sub kegiatan koordinasi dan penyusunan KUA PPAS TA 2024 dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

- a) Penyusunan Rancangan KUA PPAS TA 2024 dilaksanakan simultan dengan penyusunan rancangan RKPD Tahun 2024 yang dimulai sejak bulan Mei 2023 sampai dengan penetapan RKPD Tahun 2024



dalam Peraturan Bupati Nomor 80 tahun 2023 tertanggal 10 Juli 2023.

- b) Rancangan KUA PPAS TA 2024 dilakukan reviu oleh APIP pada tanggal 11-12 Juli 2023 yang secara proses dilakukan secara simultan dengan proses fasilitasi RKPD oleh Pemerintah Provinsi pada pertengahan bulan Juni sampai dengan penetapan RKPD.
- c) Setelah dokumen rancangan KUA PPAS TA 2024 direviu APIP dan dilakukan tindak lanjut atas reviu, maka dokumen rancangan KUA PPAS TA 2024 disampaikan kepada Kepala Daerah pada Tanggal 13 Juli 2023. Sesuai dengan Permendagri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2024, Penyampaian rancangan KUA PPAS kepada kepala daerah seharusnya dilakukan pada minggu I bulan Juli.
- d) Penyampaian atas dokumen rancangan KUA PPAS TA 2024 disampaikan kepada DPRD pada tanggal 14 Juli 2023. Sesuai dengan Permendagri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2024, Penyampaian rancangan KUA PPAS kepada DPRD dilakukan pada minggu II bulan juli dan telah disampaikan tepat waktu.
- e) Pembahasan Rancangan KUA PPAS TA 2024 antara eksekutif dan DPRD dilaksanakan pada bulan Juli dan Agustus 2023 dan dilakukan kesepakatan KUA PPAS TA 2024 pada tanggal 9 Agustus 2023.

b. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS

Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Perubahan KUA) Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai arahan Perubahan kebijakan umum di bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta pedoman dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (Perubahan PPAS) dalam rangka penyusunan Rencana Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-PAPBD) Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2023.



Sedangkan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (Perubahan PPAS) Tahun Anggaran 2023 berisi tentang Rencana Perubahan Pendapatan dan Pembiayaan Kabupaten Jombang, Perubahan Prioritas Belanja Daerah, Perubahan Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan, program/kegiatan/sub kegiatan dan rencana pembiayaan daerah. Sub kegiatan koordinasi dan penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS TA 2023 dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

- a) Penyusunan Rancangan Perubahan KUA PPAS TA 2023 dilaksanakan simultan dengan penyusunan rancangan Perubahan RKPD Tahun 2023 yang dimulai sejak bulan Mei tahun 2023 sampai dengan penetapan Perubahan RKPD Tahun 2023 dalam Peraturan Bupati Jombang Nomor 87 Tahun 2023 tertanggal 20 Juli 2023.
- b) Rancangan Perubahan KUA PPAS TA 2023 dilakukan reviu oleh APIP pada tanggal 21-24 Juli 2023 yang secara proses dilakukan secara simultan dengan proses fasilitasi Perubahan RKPD oleh Pemerintah Provinsi pada awal bulan Juli sampai dengan penetapan Perubahan RKPD
- c) Setelah dokumen rancangan Perubahan KUA — Perubahan PPAS TA 2023 direviu APIP dan dilakukan tindak lanjut atas reviu, maka dokumen rancangan Perubahan KUA-Perubahan PPAS TA 2023 disampaikan kepada Kepala Daerah pada Tanggal 26 Juli 2023 dengan surat Nomor 900/6128/415.10/2023
- d) Penyampaian atas dokumen rancangan Perubahan KUA-Perubahan PPAS TA 2023 disampaikan kepada DPRD pada tanggal 27 Juli 2023 dengan surat nomor 900/558/415.01/2023
- e) Kesepakatan atas Perubahan kua dan Perubahan PPAS TA 2023 oleh Bupati Jombang dan DPRD dilaksanakan pada tanggal 31 Juli 2023 dengan nomor 900/1463/415.44/2023 dan 188/11/pimp.DPRD/ 415.14/2023 untuk Perubahan KUA TA 2023 serta nomor 900/1464/ 415.44/2023 dan 188/12/pimp. DPRD/415.14/2023 untuk Perubahan PPAS TA 2023

c. Koordinasi, Penyusunan, dan Verifikasi RKA-SKPD

Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD ini dimaksudkan untuk menyediakan data yang benar atas penempatan kode rekening belanja dalam kegiatan dan sub kegiatan di OPD sebagai dasar persiapan penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (R-DPA SKPD) Tahun Anggaran 2024, sehingga dapat diminimalisir adanya kesalahan pemilihan kode rekening belanja, baik belanja pegawai, belanja barang dan jasa maupun belanja modal. Verifikasi atas dokumen RKA-SKPD dilaksanakan pada bulan September sampai dengan Perda tentang APBD TA 2024 dan Perbup tentang Penjabaran APBD TA 2024 ditetapkan yaitu pada bulan Desember 2023.

d. Koordinasi, Penyusunan, dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD

Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD ini dimaksudkan untuk menyediakan data yang benar atas penempatan kode rekening belanja dalam kegiatan dan sub kegiatan di OPD, sehingga dapat diminimalisir adanya kesalahan pemilihan kode rekening belanja, baik belanja pegawai, belanja barang dan jasa maupun belanja modal. Kegiatan ini dilaksanakan pada kisaran bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2023 untuk RKA pergeseran APBD TA 2023, bulan Juli sampai dengan bulan September 2023 untuk RKA Perubahan APBD TA 2023 serta bulan Oktober sampai dengan bulan Desember 2023 untuk RKA pergeseran Perubahan APBD TA 2023.

e. Koordinasi, Penyusunan, dan Verifikasi DPA-SKPD

Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD ini dimaksudkan untuk mempersiapkan secara benar atas Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) yang akan disampaikan kepada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jombang untuk dilakukan pelaksanaan penyerapannya,

setelah mendapatkan persetujuan dari Sekretaris Daerah. Kegiatan ini dilakukan pada awal bulan Januari tahun 2023 untuk DPA SKPD murni Tahun Anggaran 2023.

f. Koordinasi, Penyusunan, dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD

Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD ini dimaksudkan untuk mempersiapkan secara benar atas Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) atas dasar pengajuan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA — P), yang diajukan oleh SKPD terkait. Perubahan Anggaran/Pergeseran Anggaran dilakukan sebagai pelaksanaan atau penyesuaian atas regulasi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi karena kondisi tertentu. Kegiatan bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2023 untuk DPA pergeseran dan bulan Oktober sampai dengan bulan Desember 2023 untuk DPPA dan DPA Pergeseran setelah PAPBD TA 2023 ditetapkan.

g. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD

Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD ini dimaksudkan untuk menyediakan Dokumen Rancangan Peraturan Daerah yang akan disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jombang untuk dilakukan Pembahasan selanjutnya apabila disetujui akan dilakukan persetujuan bersama sebagai Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD. Selain itu, kegiatan ini juga dilakukan untuk penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD yang merupakan penjabaran dari Rancangan Perda APBD sebagai bagian dari rancangan Peraturan Daerah tentang APBD. Tahapan yang telah dilakukan dalam rangka penyusunan dokumen Perda APBD TA 2024 dan juga Perbup tentang Penjabaran APBD TA 2024 adalah sebagai berikut:



- a) Penyampaian Raperda tentang APBD TA 2024 dilaksanakan pada tanggal 8 September 2023 dengan surat no 188.34/639/415.01/2023
- b) Penyampaian nota keuangan (Sidang Paripurna I) atas Raperda APBD TA 2024 dilaksanakan pada tanggal 14 September 2023
- c) Pengambilan persetujuan bersama atas Raperda APBD TA 2024 (Sidang Paripurna IV) dilaksanakan pada tanggal 13 November 2023 dengan nomor 188/336/415.10.1.3/2023 dan 188/29/Pimp.DPRD/415.14/2023
- d) Perda APBD TA 2024 telah ditetapkan dengan Perda Nomor 10 Tahun 2023 dan Perbup APBD TA 2024 ditetapkan dengan Perbup Nomor 114 Tahun 2023 tanggal 15 Desember 2023.

h. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Penjabaran APBD

Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD ini dimaksudkan untuk menyediakan Dokumen Rancangan Peraturan Daerah terkait adanya perubahan berbagai alokasi pagu anggaran maupun penyempurnaan kegiatan yang akan disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jombang untuk dilakukan Pembahasan selanjutnya apabila disetujui akan dilakukan persetujuan bersama sebagai Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD. Selain itu juga untuk menampung semua pergeseran APBD yang dituangkan dalam Perubahan Peraturan Bupati Jombang tentang Penjabaran APBD yang telah dilakukan sebelum penyusunan Perubahan APBD TA 2023. Selain itu juga untuk menyediakan Dokumen Rancangan Peraturan Bupati yang merupakan penjabaran dari Rancangan Perda Perubahan APBD akan disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jombang untuk dilakukan Pembahasan sebagai bagian dari rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD. Tahapan yang telah dilakukan dalam



rangka penyusunan dokumen Perda Perubahan APBD TA 2023 dan juga Perbup tentang Perubahan APBD TA 2023 adalah sebagai berikut:

- a) Penyampaian Raperda tentang PAPBD TA 2023 dilaksanakan pada tanggal 8 agustus 2023 dengan surat nomor 188.34/583/415.01/2023
- b) Penyampaian nota keuangan (Sidang Paripurna 1) atas Raperda P-APBD TA 2021 dilaksanakan pada tanggal 11 agustus 2023
- c) Pengambilan persetujuan bersama atas raperda PAPBD TA 2023 (Sidang Paripurna |V) dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus 2023 dengan nomor 188/124/415.10.1.3/2023 dan 188/19/Pimp.DPRD/415.14/2023
- d) Perda P-APBD TA 2023 telah ditetapkan dengan Perda Nomor 8 Tahun 2023 dan Perbup P-APBD TA 2023 ditetapkan dengan Perbup Nomor 98 Tahun 2023 tanggal 15 September 2023
- e) Selain itu juga telah ditetapkan beberapa kali pergeseran atau perubahan

Penjabaran APBD yang terjadi karena adanya perubahan kebijakan dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi dan harus diakomodir, diantaranya:

- 1) Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2022 tentang Penjabaran Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- 2) Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- 3) Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;



- 4) Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2023 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- 5) Peraturan Bupati Nomor 105 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 98 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- 6) Peraturan Bupati Nomor 111 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 98 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

i. Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran

Kegiatan koordinasi dan penyusunan regulasi serta kebijakan bidang anggaran dimaksudkan untuk menyusun Anggaran Belanja Daerah berdasarkan kinerja sehingga pengeluaran / belanja daerah berdasarkan kewajaran ekonomi, efisien, efektif, transparan, adil dan dapat dipertanggung jawabkan. Kegiatan ini memiliki output berupa dokumen Analisis Standar Belanja yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 30 Tahun 2023 tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan dan Analisis Standar Belanja Tahun Anggaran 2024 dan Peraturan Bupati Jombang Nomor 113 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 30 Tahun 2023 tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan dan Analisis Standar Belanja Tahun Anggaran 2024. Dalam penyusunan Dokumen Analisis Standar Belanja, Bidang Anggaran berkoordinasi dengan Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang yang menyusun Standar Belanja Umum (SBU) dan Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) dan Bidang Aset BPKAD Kabupaten Jombang yang menyusun Satuan Standar Harga

(SSH) serta OPD Teknis. Dalam penyusunan Analisis Standar Belanja untuk Tahun Anggaran 2024 ini, kegiatan yang dilaksanakan meliputi:

- a) Koordinasi dengan OPD Teknis untuk kegiatan Konstruksi maupun Non Konstruksi;
- b) Penyusunan Formulasi ASB Konstruksi dan Non Konstruksi;
- c) Pengajuan Analisis Standar Belanja untuk mendapat Penetapan Peraturan Bupati;
- d) Mencetak Dokumen Analisis Standar Belanja dan mendistribusikannya ke semua OPD.

j. Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan

Koordinasi perencanaan anggaran pendapatan dilakukan melalui penyusunan Proyeksi Pendapatan Daerah ini dilakukan dengan melakukan Rapat Koordinasi dengan OPD Penghasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Rapat Koordinasi dilakukan untuk mendapatkan Data Proyeksi dan koordinasi sebagai upaya untuk evaluasi atas target dan potensi Pendapatan Asli Daerah baik dari sektor Pajak Daerah maupun Retribusi Daerah sehingga dapat diketahui kemampuan Keuangan Daerah sebagai input untuk penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah. Selain itu, dilakukan pula koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi berkaitan dengan Pendapatan Transfer ke Pemerintah Daerah.

k. Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah

Penyusunan proyeksi belanja dilakukan untuk Perubahan APBD TA 2023 maupun RAPBD Tahun Anggaran 2024 dilakukan untuk belanja yang bersifat *specific grant*, *block grant* maupun yang bersifat *earmark* atau diarahkan. Penyusunan Proyeksi Belanja dilakukan dengan melakukan koordinasi yang intensif dengan Bappeda untuk mengetahui potret kebutuhan belanja Daerah dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah. Kendala pada penyusunan proyeksi



belanja daerah adalah perubahan kebijakan Pemerintah Pusat terkait belanja daerah yang didanai dari dana transfer belum ada kebijakan yang mendasarinya baik DAU yang ditentukan penggunaannya, DID maupun beberapa kegiatan yang dibiayai dari DAK yang sampai dengan penetapan APBD TA 2024, aturan yang mendasari penggunaan DAU yang diarahkan belum ditetapkan.

1. Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan

Proyeksi Pembiayaan dilakukan untuk Tahun 2024 (n+1) dengan koordinasi dengan OPD terkait yang merupakan BLUD yaitu Dinas Kesehatan dan Puskesmas, RSUD Jombang dan RSUD Ploso. Rapat Koordinasi dengan BLUD guna menentukan SILPA BLUD untuk mengetahui kemampuan keuangan Daerah selain dari unsur Pendapatan dan Retribusi Daerah juga untuk menghitung total belanja BLUD berdasarkan pada proyeksi pendapatan serta proyeksi silpa.

m. Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota

Pembinaan Penganggaran Daerah Kabupaten Jombang juga telah dilakukan oleh Bidang Anggaran Sub Bidang Perencanaan Anggaran dengan melakukan kolaborasi dengan UPT Pengembangan Pengelolaan Keuangan BPKAD Provinsi Jawa Timur dan laboratorium Pengkajian dan Pengembangan Akuntansi, Perpajakan dan Sistem Informasi (LPPAPSI) Universitas Airlangga Surabaya yang dilaksanakan di UPT PPK BPKAD Provinsi Jawa Timur pada tanggal 19 hingga 20 Oktober 2023 dengan sasaran peserta adalah Perencana Ahli Muda / Kepala Sub bagian keuangan dan Perencanaan Evaluasi seluruh SKPD Kabupaten Jombang. Pemateri / Narasumber sepenuhnya oleh UPT PPK BPKAD Provinsi Jawa Timur, LPPAPSI Unair Surabaya 2 Orang dan Jumlah peserta Bimtek sebanyak 90 Orang.

2) Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah

Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah dilaksanakan untuk meningkatkan rata-rata realisasi belanja SKPD yang dapat diwujudkan dengan pelaksanaan sub kegiatan berikut:

a. Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah

Sub Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah dilaksanakan dengan tujuan untuk melaksanakan pengelolaan gaji PNS lingkup Pemkab Jombang serta pelaksanaan penyusunan Laporan Realisasi Belanja baik secara bulanan maupun semesteran. Pelaksanaan pengelolaan gaji ASN meliputi:

- a) Menyiapkan data bulanan aplikasi gaji;
- b) Melaksanakan update aplikasi gaji berdasar ketentuan perundangan;
- c) Melaksanakan pemeliharaan daftar gaji;
- d) Menyusun rekap data rekonsiliasi dengan Pemerintah Pusat;
- e) Melaksanakan rekonsiliasi data dengan Pemerintah Pusat;
- f) Menyusun rekap sebagai data realisasi belanja pegawai;
- g) Melaksanakan analisa dokumen pengajuan SKPP;
- h) Melaksanakan analisa Pembuatan SKPP;
- i) Melaksanakan analisa data gaji OPD berdasar dokumen resmi;
- j) Melaksanakan asistensi entry data SKPD.

Sedangkan kegiatan penyusunan Laporan Realisasi Belanja dilaksanakan dengan cara melakukan rekap seluruh realisasi belanja yang berasal dari SP2D GU, SP2D LS dan SP2D Nihil melalui aplikasi pengelolaan keuangan. Untuk SP2D TU maupun UP tidak dicatat sebagai realisasi belanja karena belum membebani pagu anggaran.

Pada sub kegiatan ini juga ada terdapat proses pengelolaan Dana Desa yang khusus wewenang Kepala BPKAD selaku BUD. BUD bertanggungjawab atas proses pengajuan Dana Desa kepada KPPN Mojokerto. Kewenangan berupa verifikasi pelaksanaan Dana Desa ada di Kepala DPMD. Kegiatan pengelolaan Dana Desa menghasilkan

laporan berupa persentase terserapnya Dana Desa serta sisa Dana Desa yang belum terealisasi.

b. Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD

Pelaksanaan realisasi belanja yang menggunakan SP2D harus berlandaskan Surat Penyediaan Dana (SPD). SPD yang disahkan atau ditandatangani oleh Kepala BPKAD selaku BUD berasal dari Anggaran Kas yang disusun oleh Pengguna Anggaran. Anggaran Kas adalah rencana realisasi belanja yang disusun secara triwulanan sesuai dengan jawaban pelaksanaan program dan kegiatan. Dengan demikian SP2D yang direalisasikan harus sesuai dengan periode Triwulanan yang telah dijanjikan oleh Pengguna Anggaran.

Sub Kegiatan ini juga meliputi verifikasi SPM yang diajukan Pengguna Anggaran. Verifikasi SPM dilaksanakan berdasarkan 2 (dua) dasar yaitu ketersediaan dana pada anggaran kas periode bersangkutan serta ketersediaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM).

c. Penatausahaan Pembiayaan Daerah

Kegiatan Rekonsiliasi Dana Transfer dengan Pemerintah Pusat memiliki indikator kinerja berupa laporan realisasi dana transfer sebanyak 5 laporan. Sepanjang tahun 2023 telah dihasilkan 5 laporan realisasi dana transfer. Pencapaian itu diraih dengan cara melaksanakan penyusunan lembar konfirmasi transfer ke daerah dan dana desa (LKT) yang dilakukan setiap triwulan dan akhir tahun. Laporan tersebut dipergunakan untuk mengetahui kesesuaian nominal transfer Pemerintah Pusat dengan dana transfer yang diterima di RKUD. Faktor pendorong pencapaian kinerja adalah cukupnya informasi yang diberikan oleh Pemerintah Pusat terkait besaran dana yang telah ditransfer. Pencapaian target sasaran terealisasi 100% dan tidak terdapat faktor penghambat/kendala.

d. Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya

Kegiatan Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya memiliki indikator kinerja berupa SKPD penerima dana transfer yang dikoordinasikan sejumlah 12 SKPD dengan demikian target kinerja tercapai 100%. Pencapaian itu diraih melalui koordinasi dengan SKPD terkait secara kontinu, mulai dari syarat penyaluran hingga informasi dana terkait yang telah ditransfer ke RKUD.

Beberapa faktor pendorong pencapaian kinerja adalah:

- SKPD berkoordinasi dengan baik

Pencapaian target sasaran dapat terealisasi 100%, namun terdapat beberapa faktor penghambat/kendala antara lain:

- Masih terdapat miskomunikasi antara BPKAD dengan SKPD karena perbedaan penafsiran informasi.

•

e. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

Kegiatan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah memiliki indikator kinerja berupa penerbitan laporan posisi kas sebanyak 248 laporan. Sepanjang tahun 2023 telah dihasilkan posisi kas sebanyak 248 laporan, dengan demikian target kinerja tercapai 100% Pencapaian itu diraih dengan cara melaksanakan penyusunan laporan posisi kas secara rutin setiap hari. Kelancaran penyusunan kas posisi sangat dipengaruhi oleh kejelasan rincian penerimaan atau pengeluaran. Dengan demikian apabila terdapat selisih dengan saldo bank persepsi dapat segera ditelusur menurut rincian penerimaan maupun pengeluarannya.

Beberapa faktor pendorong pencapaian kinerja sasaran laporan Posisi Kas adalah:

- Ketepatan entri data OPD pada SIPD sesuai dengan jumlah yang disetor atau dikeluarkan dari RKUD;
- Kecukupan informasi penerimaan dan pengeluaran OPD sehingga lebih mudah ditelusuri.

Pencapaian target sasaran dapat terealisasi 100%, namun terdapat beberapa faktor penghambat/kendala antara lain:

- Masih ada kekurangtepatan informasi yang menyulitkan penelusuran suatu setoran masuk OPD yang mana atau masuk jenis rincian penerimaan apa.
- Masih ada entri billing pajak yang salah sehingga menyebabkan munculnya utang pada hari itu juga.

f. Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas

Kegiatan Penempatan Uang Daerah Sebagai Optimalisasi Kas memiliki indikator kinerja berupa dokumen bilyet Deposito yang dikelola sebanyak 5 dokumen. Sepanjang tahun 2021 telah dikelola 5 dokumen bilyet. Pencapaian tersebut diraih dengan melakukan perhitungan besaran *idle cash* menggunakan data Posisi Kas tahun sebelumnya. *Idle cash* tersebut kemudian dipergunakan sebagai investasi jangka pendek berupa Deposito pada bank – bank yang telah dipilih. Bunga deposito yang diterima setiap bulan dibukukan sebagai pendapatan pemerintah daerah.

Beberapa faktor pendorong pencapaian kinerja adalah:

- Ketepatan waktu bank dalam menerbitkan bilyet Deposito;
- Ketepatan waktu pencairan bunga deposito.

Pencapaian target sasaran dapat terealisasi 100% tanpa faktor penghambat atau kendala.



g. Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pematangan Atas SP2D dengan Instansi Terkait

Sub Kegiatan ini berisi proses pelaksanaan rekonsiliasi belanja SP2D beserta potongan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK). Rekonsiliasi belanja dilaksanakan secara harian antara sub bidang pengeluaran dengan bank persepsi yaitu Bank Jatim. Potongan PFK dapat berupa Pajak yang disetorkan kepada Dirjen Pajak maupun Iuran Wajib Pegawai (IWP) yang disetor ke Taspen maupun BPJS. Rekonsiliasi harian maupun bulanan tersebut menjadi dasar pembayaran kewajiban Pemda sebesar 4% yang anggarannya terdapat di BPKAD.

Di dalam sub kegiatan ini juga terdapat proses rekapitulasi penyeteroran pajak sebagai dasar Berita Acara Rekonsiliasi yang ditandatangani Pemkab Jombang, KPPN dan KPP Pratama. Laporan rekonsiliasi berisi informasi Nomor SP2D, nominal SP2D, nominal potongan pajak, penerima SP2D, serta NTPN. Untuk mempersingkat waktu, Pemkab Jombang berkoordinasi dengan KPP Pratama untuk melakukan pencocokan data kode billiang dengan NTPN. BAR yang sudah ditandatangani merupakan syarat penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak.

h. Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan

Dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 maka Pemkab Jombang juga harus menyesuaikan dengan melakukan Perubahan Atas Peraturan daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. Beberapa hal yang menjadi perbedaan antara Permendagri 77 Tahun 2020 dengan Permendagri sebelumnya diantaranya adalah:

- a) Pengelompokan SP2D LS menjadi 3 macam yaitu LS Belanja Pegawai, LS Barang Jasa dan LS Bantuan Keuangan;



- b) Penataan kembali tugas fungsi BUD dalam hal verifikasi BUD yaitu memastikan bahwa SPM sudah dilengkapi dengan Surat pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dan belanja yang direalisasikan telah tersedia anggaran dananya;
- c) Mengatur ketentuan pengajuan Nota Pencairan Dana (NPD) dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) harus segera dibuatkan SPP oleh Bendahara maksimal 2 (dua) hari sejak diterima dan dinyatakan sah;
- d) Pelaksanaan tugas Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dilaksanakan oleh Pengguna Anggaran (PA).

3) Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah dilaksanakan untuk menyusun LK OPD tepat waktu yang dapat diwujudkan dengan pelaksanaan sub kegiatan berikut:

a. Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah

Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah bertujuan untuk menyajikan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah yang akurat dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

- a) Rekonsiliasi internal (Bidang akuntansi dan perbendaharaan);
- b) Rekonsiliasi data realisasi pendapatan pajak daerah, retribusi daerah, dan lain lain PAD yang sah dengan bendahara penerimaan;
- c) Rekonsiliasi belanja, dan pengeluaran lain dengan bendahara pengeluaran.

Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah terkendala dengan terlambatnya melakukan perekaman data oleh bendahara SKPD ke dalam aplikasi dan kurang responsifnya bendahara jika terjadi koreksi terhadap data transaksi.

b. Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban

Kegiatan Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban ini bertujuan untuk menyajikan data rekonsiliasi keuangan secara berkala setiap triwulan sebagai upaya bentuk tindakan preventif terjadinya kesalahan yang material pada saat penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Hasil rekonsiliasi masing-masing dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi

Adapun rincian kegiatan sebagai berikut :

- a) Rekonsiliasi internal (Bidang akuntansi dan perbendaharaan);
- b) Rekonsiliasi data Persediaan, utang-piutang, LRA, LO, Belanja Modal dan Neraca dengan SKPD.

Kendala yang dihadapi pada kegiatan ini adalah harus menunggu data hasil rekonsiliasi pengurus barang dan bidang aset, serta keterlambatan SKPD dalam melakukan entry dan posting data pada aplikasi

c. Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran

Melalui kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran diharapkan BPKAD sebagai entitas akuntansi entitas dan pelaporan dapat menyajikan LRA dan Laporan Prognosis yang transparan dan akuntabel kepada para *stakeholder* (laporan rutin kepada Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan DPRD Kabupaten Jombang.

Selain itu, laporan keuangan juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada pemangku kebijakan dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*)



Kendala yang dihadapi sub kegiatan ini adalah kurang proaktifnya SKPD dalam proses penyusunan laporan terutama dalam penyusunan prognosis.

d. Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah merupakan rangkaian kegiatan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang menyajikan informasi mengenai aktivitas fiskal dan posisi keuangan pemerintah daerah secara keseluruhan. LKPD ini disampaikan kepada Inspektorat untuk di-review pada tanggal 13 Maret 2023 hal ini sesuai dengan Lampiran Permendagri No 77 Th 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah BAB VII AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH huruf B. Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah, No.1 Ketentuan Umum huruf g. Laporan keuangan Pemerintah Daerah dilakukan reviu oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan untuk dilakukan pemeriksaan.

Kendala yang dihadapi sub kegiatan ini adalah proses konsolidasi laporan keuangan dimana untuk SKPD besar seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menyusun laporan keuangan SKPD, selain itu SIPD pelaporan keuangan baru pertama kali digunakan untuk penyusunan laporan keuangan sehingga diperlukan pendampingan yang lebih intens dengan jumlah personel di subbidang akuntansi yang terbatas.

e. Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota

Mengacu Peraturan Menteri dalam negeri no 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah bab VIII hal Penyusunan Rancangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota.

Kendala yang dihadapi di sub kegiatan ini adalah lampiran laporan pertanggungjawaban yang belum disediakan oleh SIPD, sehingga harus dibuat secara manual menggunakan aplikasi excel.

f. Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah bertujuan menyusun kebijakan dan panduan teknis bagi pelaksana untuk menyajikan laporan keuangan yang relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

g. Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah memiliki tujuan yaitu untuk Akuntabilitas (sistem akuntansi pemerintah mampu memberikan informasi keuangan yang lengkap cermat, dalam bentuk dan waktu yang tepat, yang berguna bagi pihak yang bertanggungjawab yang berkaitan dengan operasi unit- unit pemerintah. Lebih lanjut lagi, tujuan akuntabilitas ini mengharuskan tiap pegawai atau badan yang mengelola



keuangan negara harus memberikan pertanggungjawaban dan perhitungan atas laporan keuangannya), Manajerial (Akuntansi pemerintah mampu memberikan informasi keuangan yang diperlukan untuk perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian anggaran, perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan, dan penilaian kinerja pemerintah) dan Pengawasan (Akuntansi pemerintah harus memungkinkan terselenggaranya pemeriksaan oleh aparat pengawasan fungsional secara efektif dan efisien)

Kendala yang dihadapi dalam sub kegiatan ini yaitu adanya kebijakan dan sistem akuntansi baru mengenai properti investasi.

h. Pembinaan Akuntansi, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota bertujuan meningkatkan pengetahuan dan pemahaman para penyusun laporan keuangan di SKPD sehingga meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Output dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya kegiatan Bimbingan Teknis Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2023 pada tanggal 9-10 November Tahun 2023 yang diikuti oleh 186 orang peserta.

2. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Program Pengelolaan Barang Milik Daerah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan prosentase SKPD yang menyusun laporan BMD secara tepat waktu, capaian pemanfaatan aset, dan capaian aset yang bersertifikat, yang dilaksanakan melalui satu kegiatan yaitu kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah.

1) Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah

Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah dilaksanakan untuk mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset yang transparan dan akuntabel serta terwujudnya optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan



aset daerah. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan capaian pada persentase OPD yang tertib tata kelola BMD, pengelolaan aset yang dimanfaatkan, capaian proses setrifikat aset daerah, serta aset daerah yang terinventarisasi dalam laporan BMD tematik tahunan. Sasaran-sasaran tersebut diwujudkan dengan sub kegiatan berikut:

a. Penyusunan Standar Harga

Penyusunan Standar Harga dilakukan untuk mencari nilai kewajaran atas harga di pasar dengan satuan unit barang/jasa yang berlaku di suatu daerah. Hal ini dilakukan untuk dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan anggaran belanja daerah dengan menghindari kebocoran dan keborosan dalam proses pengadaan barang/jasa. Standar Satuan Harga ditetapkan oleh Peraturan Bupati. Selama tahun 2023 telah terbit dokume Standar Harga Satuan antara lain:

- Peraturan Bupati Nomor 21 tanggal 16 Mei 2023 tentang Standar Satuan Harga Barang Tahun 2024;
- Peraturan Bupati Nomor 28 tanggal 12 Juni 2023 tentang Standar Satuan Harga Barang Tahun 2023.

b. Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah

Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah adalah untuk kebutuhan/pengadaan yang sebenarnya atau berupa buku rekapitulasi kebutuhan OPD. Dimana Standar Barang adalah spesifikasi barang yang ditetapkan sebagai acuan perhitungan pengadaan dan penggunaan BMD dalam Perencanaan Kebutuhan, dan Standar Kebutuhan adalah satuan jumlah barang yang dibutuhkan sebagai acuan perhitungan pengadaan dan penggunaan. Dari sub kegiatan ini telah terbit satu dokumen yaitu : Surat Keputusan Bupati tentang Standar Barang dan Standar Ketuhan (SBSK) tahun Nomor 188.4.45/221/415.10.1.3/2023 tanggal 10 Agustus 2023,



tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2024.

c. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah

Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan BMD yang ada pada Pengelola Barang dan/atau Pengguna Barang dan harus dapat mencerminkan kebutuhan riil BMD pada SKPD sehingga dapat dijadikan dasar dalam penyusunan RKBMD. Selama Tahun 2023 telah tersusun dua dokumen yaitu :

- Surat Keputusan Sekretaris Daerah No. 188/622/415.44/2023 tanggal 13 Juni 2023, tentang Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2024;
- Surat Keputusan Sekretaris Daerah No. 188/630.1 /415.44/2023 tanggal 13 Juni 2023, tentang Perubahan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2023.

d. Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah

Produk kebijakan daerah yang ditargetkan sebagai hasil kinerja sub kegiatan ini adalah Peraturan Bupati Jombang sebagai tindak lanjut pedoman teknis pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021. Tanpa mencabut Peraturan Bupati Jombang Nomor 55 Tahun 2009 tentang Sistem dan prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah. Dari sub kegiatan ini telah terealisasi satu dokumen yaitu Draft Peraturan Bupati tentang rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah.

e. Penatausahaan Barang Milik Daerah

Kegiatan mengkoordinasikan pelaksanaan Sistem Informasi Barang Milik Daerah dengan asistensi pemutakhiran indikator jumlah asistensi yang dilaksanakan untuk Sistem Informasi Barang Milik Daerah dapat terealisasi sebesar 99.1% dari target 100% dengan capaian kinerja 150%.



Asistensi pemutakhiran Sistem Informasi Barang Milik Daerah dilaksanakan secara berkala pada Tahun 2023 sebanyak 4 kali asistensi terkait implementasi SIMDA BMD dengan BPKP Perwakilan Propinsi Jawa Timur dan 2 kali asistensi terkait e BMD dengan Lembaga Pengkajian dan Penerapan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia (LPPIA FIA UI) terkait implementasi E BMD sebagai aplikasi Sistem Informasi Barang Milik Daerah yang dapat menyajikan laporan BMD sesuai dengan format yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah.

f. Inventarisasi Barang Milik Daerah

Kegiatan Inventarisasi BMD tahun 2023 difokuskan pada inventarisasi peralatan dan mesin, baik yang telah tercatat di neraca BMD KIB-B maupun yang belum tercatat, namun sesungguhnya adalah menjadi kewenangan dan penguasaan Pemerintah kabupaten Jombang. Dalam hal ini, telah tersusun satu dokumen hasil inventarisasi untuk peralatan dan mesin sesuai dengan yang diamanatkan Permendagri Nomor 47 tahun 2021 tentang Tata cara pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan BMD.

g. Pengamanan Barang Milik Daerah

Ruang lingkup dari sub kegiatan Pengamanan BMD, meliputi aktivitas pengamanan secara fisik dan secara hukum / legalitas kepemilikan aset melalui sertifikasi aset daerah. Untuk pengamanan secara fisik atas aset tanah milik Pemkab Jombang dilakukan dengan pemasangan tanda batas (patok) dan papan nama identitas aset daerah. Dari target 40 lokasi pengamanan fisik aset tanah, telah dicapai sasaran pengamanan Barang Milik Daerah dengan pemasangan patok batas aset tanah sebanyak 40 lokasi dan pemasangan papan nama kepemilikan aset tanah. bangunan milik Pemkab. Jombang sebanyak 40 Lokasi, sebagaimana rekapitulasi data terlampir. Adapun dari target 450 berkas dokumen pengajuan sertifikasi aset di tahun 2022, telah dapat



direalisasikan pengajuan berkas sertifikasi sebanyak 699 berkas dokumen, untuk di proses di Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang. Secara terinci pengajuan 699 berkas tersebut, terdiri dari 415 pemberkasan melalui jalur regular, sedangkan jalur PTSL terdapat 284 berkas. Hingga diakhir tahun 2022 telah menjadi produk sertifikat sebanyak 505 buku sertifikat, dengan rincian 140 buku sertipikat merupakan output pemberkasan tahun 2022, 158 buku sertipikat merupakan output pemberkasan tahun sebelumnya, 207 buku sertipikat merupakan output dari pemberkasan PTSL tahun 2022. Berkas dokumen masih berada pada tahapan : Pengukuran sebanyak 143 berkas; terdapat 107 berkas Pendaftaran SK Hak; dan sebanyak 25 berkas Pendaftaran Hak, untuk selanjutnya diselesaikan pada tahun 2023.

h. Penilaian Barang Milik Daerah

Kegiatan penilaian barang milik daerah merupakan suatu proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu objek penilaian berupa barang milik daerah pada saat tertentu. Tujuan dilakukan penilaian aset daerah yaitu dalam rangka penyusunan neraca pemerintah daerah, pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah. Penilaian aset daerah yang dapat dilakukan antara lain seperti Peralatan dan mesin, tanah, gedung dan bangunan serta aset tetap lainnya. Pada kegiatan ini, di APBD Tahun Anggaran 2022 terdapat 5 dokumen penilaian sedangkan pada P-APBD Tahun Anggaran 2022 mendapat tambahan anggaran dikarenakan banyaknya kebutuhan penilaian pada SKPD sehingga terdapat tambahan target dengan jumlah 5 dokumen. Dari jumlah total target 10 dokumen, hingga akhir tahun anggaran target tersebut tercapai sesuai target 12 dokumen dengan capaian presentase 120%.

i. Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah

Sebagai bagian dari kegiatan pengelolaan barang milik daerah, sub kegiatan pengawasan dan pengendalian lebih bersinggungan dengan hal mendasar seperti data base aset daerah, mengingat Aset atau Barang Milik Daerah merupakan salah satu unsur penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Barang milik daerah (BMD) merupakan salah satu aset yang paling vital dalam penyelenggaraan pemerintahan, namun dalam pelaksanaan pengelolaannya sarat dengan potensi konflik kepentingan.

Beberapa permasalahan yang umum ditemukan dalam pengelolaan Barang Milik Daerah adalah belum lengkapnya data mengenai jumlah, nilai, kondisi, dan status kepemilikan Barang Milik Daerah. Tidak lengkapnya data barang milik daerah ini, memperlambat proses kegiatan dalam siklus pengelolaan Barang Milik Daerah. Permasalahan ini berkaitan dengan kegiatan identifikasi dan inventarisasi Barang Milik Daerah. Selain itu, belum tersedianya basis data (*database*) yang akurat dalam rangka penyusunan neraca pemerintah daerah sehingga terdapat kemungkinan bahwa data yang disajikan dalam neraca aset masih belum sesuai dengan kondisi sebenarnya di lapangan. Disamping itu adanya perbedaan persepsi diantara pemangku kepentingan (*stakeholders*) dapat menyebabkan terjadinya potensi sengketa kepemilikan aset daerah dan tidak tepatnya langkah yang diambil dalam rangka pengelolaan barang milik daerah.

Dari pelaksanaan kegiatan sampai saat ini terdapat 4 kasus yang menjadi fokus penanganan diantaranya kasus pemanfaatan tanah tanpa izin di Desa Pulogedang Tembelang, sengketa ruko Simpang Tiga dengan munculnya piutang atas sewa yang tidak terbayar, Pasar Citra Niaga terkait adanya perpanjangan HGB tanpa persetujuan Bupati, serta pendirian bangunan liar di Desa Karangpakis Kabuh.



j. Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah

Sub Kegiatan Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah adalah salah satu sub pengelolaan Barang Milik Daerah yang merupakan salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pembangunan Daerah yang perlu dikelola secara tertib dan optimal dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Dalam kegiatan optimalisasi, terdapat beberapa kegiatan yang dapat didefinisikan sebagai berikut:

- a) Penggunaan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan Barang Milik Negara/Daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi instansi yang bersangkutan.
- b) Pemanfaatan adalah upaya pendayagunaan Barang Milik Negara/Daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga/satuan kerja perangkat daerah dan/atau optimalisasi Barang Milik Negara/Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.
- c) Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Negara/Daerah
- d) Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik dan/atau kegunaan Barang Milik Negara/Daerah.
- e) Penghapusan adalah tindakan menghapus Barang Milik Negara/Daerah dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang, dan/atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.



k. Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah

Kegiatan rekonsiliasi BMD pada Tahun 2023 dilaksanakan 4x yaitu pada triwulan 1, II, I, dan IV tahun 2023 sebagai dasar penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jombang TA 2023. Rekonsiliasi triwulan I dilaksanakan pada awal bulan April dimana kami bisa menyelesaikan secara tepat waktu. Rekonsiliasi triwulan II dilaksanakan bulan Juli untuk penatausahaan bulan April sampai dengan Juni, adapun rekonsiliasi triwulan III dilaksanakan pada bulan Oktober untuk penatausahaan bulan Juli sampai September. Dan sebagai upaya tindak lanjut atas hasil evaluasi MCP KPK terhadap penatausahaan aset daerah untuk melakukan percepatan pelaksanaan rekonsiliasi BMD untuk SKPD maka dilaksanakan rekonsiliasi aset triwulan IV di bulan Desember yang dilaksanakan di akhir bulan Desember.

1. Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah

Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah maka Pemerintah Kabupaten wajib menyusun Laporan BMD yang dapat menggambarkan serangkaian proses pembukuan dan inventarisasi yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Jombang di tahun 2022, sehingga diharapkan bisa memberikan informasi yang komprehensif terkait BMD bagi semua pihak yang membutuhkan data tentang BMD di Pemerintah Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2022.

m. Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota

Kegiatan ini diharapkan untuk meningkatkan pemahaman bersama terhadap pengelolaan BMD sebagaimana tercantum pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan,



Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik. Kegiatan ini dilaksanakan sesuai dengan target yaitu dilaksanakan 2 kali, yang pertama dengan mengundang pejabat Kementerian Dalam Negeri dan LPPIA FIA UI sebagai narasumber kegiatan bimtek Implementasi aplikasi e BMD sesuai Permendagri Nomor 47 Tahun 2021 dengan peserta 100 Pengurus Barang dan Pengurus Barang Pembantu di lingkup Pemerintah Kabupaten Jombang yang dilaksanakan pada tanggal 30-31 Mei 2023 bertempat di Surabaya, yang kedua dilaksanakan pada tanggal 5-7 Desember 2023 yaitu Intensifikasi Pendampingan Percepatan Input Data Pengadaan BMD pada aplikasi e BMD yang bertempat di Jombang dengan peserta 100 Pengurus Barang dan Pengurus Barang Pembantu di lingkup Pemerintah Kabupaten Jombang.

3. Program Penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dilaksanakan untuk mewujudkan dokumen perencanaan dan laporan keuangan yang tersusun tepat waktu. Sasaran tersebut dapat diwujudkan dengan sub kegiatan berikut:

a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Sasaran tersusunnya dokumen rencana kerja dengan indikator Jumlah dokumen rencana kerja yang tersusun dapat terealisasi sebesar 100% dari target 100% dengan capaian kinerja 100%. Selama tahun 2023, telah disusun satu dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan satu dokumen Renja Perubahan tahun 2023 yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Jombang Nomor 188/565.1/415.44/2023 Tentang Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2024, tanggal 29 Mei 2023 dan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Jombang Nomor 188/691.1/415.44/2023 Tentang Rencana Kerja Perubahan



Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2023, tanggal 27 Juni 2023. Selain itu, rencana kinerja terealisasi dengan tersusunnya dokumen pendukung penyusunan perencanaan program, dokumen rencana kegiatan, dokumen pendukung Perubahan Renja dan RKAP TA 2023, dokumen pendukung Renja TA 2024, serta dokumen RKA dan DPA 2024.

b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sasaran tersusunnya dokumen laporan kinerja perangkat daerah dengan indikator sub kegiatan jumlah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dapat terealisasi sebesar 100% dari target 100% dengan capaian kinerja 100%. Selama tahun 2023, telah disusun dokumen tersebut yakni Laporan evaluasi internal BPKAD Kabupaten Jombang tahun 2023. Selain itu, rencana kinerja terealisasi dengan tersusunnya dokumen evaluasi laporan kinerja TA 2023, serta dokumen laporan kinerja Triwulan I, II, III, dan IV TA 2023.

2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dilaksanakan untuk menunjang kelancaran administrasi perkantoran. Sasaran tersebut dapat diwujudkan dengan sub kegiatan berikut:

a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Sasaran tersedianya gaji dan tunjangan ASN dengan indikator jumlah gaji dan tunjangan ASN yang tersedia dapat terealisasi sebesar 100% dari target 100% dengan capaian kinerja 100%. Selama tahun 2023, telah dibayarkan gaji dan tunjangan ASN selama 12 bulan sebagaimana target yang ditetapkan di rencana kerja tanpa ditemukan adanya hambatan dalam proses pengolahan dan pembayaran gaji. Dalam pelaksanaan sub kegiatan ini dilakukan koordinasi dengan Bidang Akuntansi dan Perbendaharaan. Output dari sub kegiatan yang mendukung proses

pembayaran gaji dan tunjangan ASN antara lain SPP, SPM, dan Daftar Gaji Tahun 2023.

b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Sasaran tersusunnya laporan keuangan akhir tahun SKPD dengan indikator jumlah dokumen laporan keuangan SKPD dapat terealisasi sebesar 100% dari target 100% dengan capaian kinerja sebesar 100%. Selama tahun 2023, telah tersusun dokumen laporan keuangan sebanyak satu dokumen. Dokumen yang tersusun dari pelaksanaan sub kegiatan ini adalah dokumen Laporan Keuangan Tahun 2022.

Beberapa faktor pendorong pencapaian kinerja sasaran tersusunnya rencana kerja SKPD yang ditindaklanjuti adalah:

- Adanya dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak antara lain bidang Akuntansi dan Perbendaharaan, bidang Aset, serta Inspektorat dalam pelaksanaan koordinasi yang dibutuhkan selama proses penyusunan dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun

3) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dilaksanakan untuk menunjang kelancaran administrasi perkantoran. Sasaran tersebut dapat diwujudkan dengan sub kegiatan berikut:

a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Sasaran tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor dengan indikator jenis dan jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia dapat terealisasi sebesar 100% dari target 100% dengan capaian kinerja sebesar 100%. Selama tahun 2023, terdapat 12 paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang telah terealisasikan penyediaannya. Output yang menjadi bukti telah terlaksananya sub kegiatan ini adalah kwitansi dalam setiap transaksi terkait.

b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Sasaran tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor dengan indikator jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia dapat terealisasi sebesar 100% dari target 100% dengan capaian kinerja sebesar 100%. Selama tahun 2023, terdapat 20 paket peralatan dan perlengkapan kantor yang telah terealisasikan penyediaannya. Output yang menjadi bukti telah terlaksananya sub kegiatan ini adalah tersedianya alat tulis kantor, bahan komputer, jasa kantor, serta sewa peralatan yang didukung bukti register SPP dan SPM.

c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Sasaran tersedianya penyediaan peralatan rumah tangga dengan indikator jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia dapat terealisasi sebesar 100% dari target 100% dengan capaian kinerja sebesar 100%. Selama tahun 2023, terdapat 12 paket peralatan rumah tangga yang telah terealisasikan penyediaannya. Output yang menjadi bukti telah terlaksananya sub kegiatan ini adalah tersedianya isi tabung gas dan bahan lainnya yang didukung bukti register SPP dan SPM.

d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Sasaran tersedianya penyediaan bahan logistik kantor dengan indikator jumlah bahan logistik kantor yang tersedia dapat terealisasi sebesar 100% dari target 100% dengan capaian kinerja sebesar 100%. Selama tahun 2023, terdapat 50 paket bahan logistik kantor yang telah terealisasikan penyediaannya. Output yang menjadi bukti telah terlaksananya sub kegiatan ini adalah tersedianya makan dan minum rapat, tamu, dan PDT yang didukung bukti register SPP dan SPM.

e. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Sasaran tersedianya penyediaan barang cetakan dan penggandaan dengan indikator jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia dapat terealisasi sebesar 100% dari target 100% dengan capaian kinerja sebesar 100%. Selama tahun 2023 terdapat 5 paket barang cetakan dan



penggandaan yang telah terealisasi penyediaannya. Output yang menjadi bukti telah terlaksananya sub kegiatan ini adalah tersedianya kertas dan cover serta spanduk yang didukung bukti register SPP dan SPM.

f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Sasaran tersedianya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dengan indikator jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia dapat terealisasi sebesar 100% dari target 100% dengan capaian kinerja sebesar 100%. Selama tahun 2023, terdapat 10 dokumen terkait bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang telah terealisasi penyediaannya. Output yang menjadi bukti telah terlaksananya sub kegiatan ini adalah tersedianya jurnal/surat kabar/majalah yang didukung bukti register SPP dan SPM.

g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Sasaran terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan indikator jumlah rapat koordinasi dan konsultasi skpd yang terselenggara dapat terealisasi sebesar 100% dari target 100% dengan capaian kinerja sebesar 100%. Selama tahun 2023, terdapat 12 laporan atas pelaksanaan rapat yang telah terealisasi. Output yang menjadi bukti telah terlaksananya sub kegiatan ini adalah terselenggaranya rapat ke luar daerah yang didukung bukti register SPP dan SPM.

4) Kegiatan Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kegiatan Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dilaksanakan untuk menunjang sarana dan prasarana aparatur untuk meningkatkan kinerja layanan. Sasaran tersebut dapat diwujudkan dengan sub kegiatan berikut:



a. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Sasaran tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya dengan indikator jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan dapat terealisasi sebesar 100% dari target 100% dengan capaian kinerja sebesar 100%. Selama tahun 2023, telah terlaksana pengadaan sarana dan prasarana kantor sesuai dengan usulan yang telah dihimpun dan berdasarkan dokumen RKBD yang telah tersusun sebelumnya. Output yang menjadi bukti telah terlaksananya sub kegiatan ini adalah tersedianya sarana dan prasarana serta didukung oleh bukti register SPP dan SPM

5) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dilaksanakan untuk menunjang kelancaran administrasi. Sasaran tersebut dapat diwujudkan dengan sub kegiatan berikut:

a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Sasaran tersedianya jasa surat menyurat dengan indikator jumlah jasa surat menyurat yang tersedia dapat terealisasi sebesar 100% dari target 100% dengan capaian kinerja sebesar 100%. Selama tahun 2023, telah terlaksana jasa surat menyurat selama 12 bulan. Output yang menjadi bukti telah terlaksananya sub kegiatan ini adalah tersedianya materai serta didukung oleh bukti register SPP dan SPM.

b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Sasaran tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dengan indikator jumlah jenis rekening yang dibayarkan terealisasi sebesar 100% dari target 100% dengan capaian kinerja sebesar 100%. Selama tahun 2023, telah terlaksana jumlah jenis rekening yang dibayarkan untuk jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik terdapat

12 laporan terkait. Output untuk sub kegiatan ini adalah register SPP dan SPM.

c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Sasaran tersedianya jasa pelayanan umum kantor dengan indikator jumlah jasa pelayanan umum kantor yang tersedia dapat terealisasi sebesar 100% dari target 100% dengan capaian kinerja sebesar 100%. Selama tahun 2023, telah terlaksana jasa pelayanan umum kantor selama 12 bulan. Output yang menjadi bukti telah terlaksananya sub kegiatan ini adalah dengan dibayarkannya honor penanggungjawab pengelola keuangan, jasa tenaga administrasi, PBB, lembur, dan iuran jaminan serta didukung oleh bukti register SPP dan SPM.

d. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Sasaran tersedianya jasa pelayanan umum kantor dengan indikator jumlah jasa pelayanan umum kantor yang tersedia dapat terealisasi sebesar 100% dari target 100% dengan capaian kinerja sebesar 100%. Selama tahun 2023, telah terlaksana jasa pelayanan umum kantor selama 12 bulan. Output yang menjadi bukti telah terlaksananya sub kegiatan ini adalah dengan dibayarkannya honor penanggungjawab pengelola keuangan, jasa tenaga administrasi, PBB, lembur, dan iuran jaminan serta didukung oleh bukti register SPP dan SPM.

6) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dilaksanakan untuk meningkatkan prosentase saran dan prasarana aparatur yang menunjang kinerja pelayanan. Sasaran tersebut dapat diwujudkan dengan sub kegiatan berikut:



a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Sasaran tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan dengan indikator kinerja sub kegiatan ini adalah jumlah kendaraan dinas atau kendaraan jabatan yang dipelihara dengan target sebanyak satu unit kendaraan dinas roda empat. Realisasi kinerja kegiatan telah sesuai dengan target, sehingga capaian kerjanya sebesar 100%. Output yang menjadi bukti telah terlaksananya sub kegiatan ini adalah dengan terlaksananya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas (STNK roda empat) serta didukung oleh bukti register SPP dan SPM.

b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Sasaran tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan dengan indikator kinerja sub kegiatan ini adalah jumlah kendaraan dinas/operasional atau lapangan yang dipeliharadengan target sebanyak 20 (dua puluh) unit kendaraan dinas roda empat dan 25 (dua puluh lima) unit kendaraan dinas roda dua. Realisasi kinerja kegiatan telah sesuai dengan target, sehingga capaian kerjanya sebesar 100%. Output yang menjadi bukti telah terlaksananya sub kegiatan ini adalah dengan terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas (minyak pelumas, BBM, suku cadang, jasa service) serta didukung oleh bukti register SPP dan SPM.

c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Sasaran terpeliharanya gedung kantor dan bangunan lainnya dengan Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah gedung kantor/bangunan pendukung yang dipelihara dengan target 1 (satu) kali pemeliharaan gedung kantor dengan rincian pengecatan pagar, perbaikan atap, perbaikan paving, perbaikan plafond dan pintu, perbaikan mushola,

pemeliharaan ruang pimpinan, pemeliharaan taman kantor, serta Belanja Modal Gedung dan Bangunan berupa ruang rapat kantor dengan satuan 1 (satu) paket. Realisasi kinerja kegiatan telah sesuai dengan target, sehingga capaian kinerjanya sebesar 100%.

d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Sasaran terpeliharanya sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya dengan indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara dengan target 25 (dua puluh lima) sarpras dengan rincian AC 20 (dua puluh) unit, mesin ketik 2 (dua) unit. Realisasi kinerja kegiatan telah sesuai dengan target, sehingga capaian kinerjanya sebesar 100%. Output yang menjadi bukti telah terlaksananya sub kegiatan ini adalah register SPP dan SPM.

B. REALISASI ANGGARAN

Dari pagu anggaran yang diterima Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2023 sebesar Rp 8.062.206.500,00 selanjutnya dialokasikan untuk mendanai 3 (tiga) program yang tertuang di 10 (sepuluh) kegiatan dan 60 (enam puluh) sub kegiatan. Alokasi pagu anggaran dan realisasi per program Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.8
Alokasi Per Sasaran Pembangunan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran		
		Alokasi	Realisasi	Capaian
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	617.208.528.390	604.931.687.044	98%
	Indeks Pengelolaan Aset Daerah	2.666.139.200	2.559.368.305	96%



Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP	45.093.507.459	44.272.069.488	98%
---	-------------	----------------	----------------	-----

Tabel 3.9
Pencapaian Kinerja dan Anggaran Sasaran

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Alokasi Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	74,50	77,00	103,86	617.208.528.390	604.931.687.044	98
	Indeks Pengelolaan Aset Daerah	60,00	77,91	129,85	2.666.139.200	2.559.368.305	96
Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP	80,3	82,48	102,71	45.093.507.459	44.272.069.488	98

Tabel 3.10
Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program

Program	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Alokasi	Realisasi	Capaian (%)
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Skor Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran	0,95	0,95	0,95	617.208.528.390	604.931.687.044	98
	Skor Kesesuaian pegalokasian anggaran belanja	1,00	1,00	1,00			



Program	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Alokasi	Realisasi	Capaian (%)
	Skor transparansi pengelolaan keuangan daerah	0,84	0,84	0,84			
	Skor penyerapan anggaran	0,75	0,75	0,75			
	Skor Opini BPK atas LKPD	1,00	1,00	1,00			
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Prosentase SKPD yang menyusun Laporan BMD tepat waktu	44%	46%	103%	2.666.139.200	2.559.368.305	96
	Peningkatan capaian pemanfaatan aset	16%	21,16%	132%			
	Peningkatan capaian aset daerah yang bersertifikat	10,75%	10,75%	100%			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase penunjang urusan pemerintah daerah yang disusun sesuai aturan	100%	100%	100	45.093.507.459	44.272.069.488	98

Terlihat pada tabel di atas, realisasi anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah untuk tahun 2023 adalah sebesar Rp 651.763.124.837 atau sebesar 98%. Akuntabilitas keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, ketaatan dan kepatuhan terhadap peraturan perundangan-undangan. Sasaran pertanggungjawaban adalah laporan keuangan yang berlaku, meliputi penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran uang SKPD. Sedangkan Instrumen utama akuntabilitas keuangan adalah anggaran pemerintah dan data laporan tahunan yang disusun secara periodik sehingga nampak proses penganggaran secara keseluruhan relevan untuk dipertanggungjawabkan dan



pengendaliannya pada berbagai tingkatan operasi dari masing-masing indikator keuangan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan Tahun Anggaran 2023.

Tabel 3.11
Penyerapan terhadap Pagu Anggaran Per Program Tahun 2023

Program/Kegiatan	Indikator	Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian (%)
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Skor Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran	617.208.528.390	604.931.687.044	98%
	Skor Kesesuaian pegalokasian anggaran belanja			
	Skor transparansi pengelolaan keuangan daerah			
	Skor penyerapan anggaran			
	Skor Opini BPK atas LKPD			
Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Prosentase Kesesuaian nomer-klatur program RKPD dan KUA-PPAS;	1.944.401.250	1.849.993.813	95%
	Prosentase Kesesuaian nomer-klatur program KUA_PPAS dan APBD;			
	Prosentase Kesesuaian pagu program RKPD dan KUA-PPAS; dan			
	Prosentase Kesesuaian pagu program KUA-PPAS dan APBD.			



Program/Kegiatan	Indikator	Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian (%)
	Tingkat ketepatan waktu penyampaian RAPBD dan RPAPBD ke DPRD tepat waktu			
Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	44.431.000	41.066.750	92%
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	42.722.450	40.496.280	95%
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	5.267.300	4.975.000	94%
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	8.535.000	7.837.500	92%
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi	83.002.000	78.724.533	95%
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	157.302.000	144.681.000	92%
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	570.988.000	548.749.000	96%
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	639.287.000	605.376.780	95%
Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	149.875.000	147.956.000	99%
Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	22.810.000	22.894.500	100%



Program/Kegiatan	Indikator	Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian (%)
Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	32.778.000	31.815.500	97%
Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	17.560.000	15.785.000	90%
Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	169.843.500	159.635.970	94%
Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Prosentase rata-rata deviasi belanja SKPD	352.654.500	322.911.408	92%
Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	18.948.000	18.593.662	98%
Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	51.354.000	49.750.000	97%
Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	9.354.000	8.696.500	93%



Program/Kegiatan	Indikator	Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian (%)
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	3.857.500	2.875.000	75%
Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	5.866.000	2.483.700	42%
Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pematangan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pematangan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	121.730.000	121.025.686	99%



Program/Kegiatan	Indikator	Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian (%)
Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	141.545.000	119.486.860	84%
Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Prosentase rata-rata realisasi belanja Bantuan Keuangan, BTT dan Dana Bagi Hasil	614.275.454.540	602.166.815.784	98%
Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	577.079.230.950	577.074.518.117	100%
Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	16.472.553.766	4.368.627.944	27%
Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	20.723.669.824	20.723.669.723	100%
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Prosentase OPD yang menyusun LK OPD tepat waktu	636.018.100	591.966.039	93%
Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	5.560.000	2.310.000	42%



Program/Kegiatan	Indikator	Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian (%)
Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	6.010.000	1.529.910	25%
Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	4.100.000	2.335.000	57%
Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	75.848.300	71.276.785	94%
Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	326.478.000	323.910.000	99%



Program/Kegiatan	Indikator	Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian (%)
Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	90.150.000	82.994.369	92%
Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	53.635.000	43.081.575	80%
Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	74.236.800	64.528.400	87%
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Bobot persentase SKPD yang menyusun Laporan BMD tepat waktu	2.666.139.200	2.559.368.305	96%
	Bobot Peningkatan capaian pemanfaatan aset			
	Bobot Peningkatan capaian aset daerah yang bersertifikat			
Pengelolaan Barang Milik Daerah	Prosentase OPD yang menyusun laporan BMD tepat waktu	2.666.139.200	2.559.368.305	96%
	Prosentase pengelolaan aset yang dimanfaatkan			



Program/Kegiatan	Indikator	Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian (%)
	Prosentase pengajuan sertifikasi aset daerah			
	Prosentase aset daerah yang terinventarisasi dalam laporan BMD tematik tahunan			
Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	152.107.500	151.838.950	100%
Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	42.500.000	42.471.850	100%
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	33.839.650	33.817.025	100%
Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	66.061.500	65.658.500	99%
Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	295.173.000	292.463.990	99%
Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	300.282.500	265.972.100	89%
Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	844.022.050	802.880.050	95%
Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	273.948.450	258.328.602	94%



Program/Kegiatan	Indikator	Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian (%)
Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	34.920.500	32.497.721,00	93%
Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	339.399.350	334.834.295	99%
Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	22.050.000	21.996.635	100%
Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	19.648.700	19.618.000	100%
Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	242.186.000	236.990.587	98%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase penunjang urusan pemerintah daerah yang disusun sesuai aturan	45.093.507.459	44.272.069.488	98%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase dokumen perencanaan dan laporan keuangan yang tersusun tepat waktu	23.048.000	22.504.000	98%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12.793.000	12.296.500	96%



Program/Kegiatan	Indikator	Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian (%)
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.255.000	10.207.500	100%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase penunjang kelancaran administrasi perkantoran	42.553.444.559	41.850.754.215	98%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	42.151.243.559	41.457.410.315	98%
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	383.526.000	375.175.500	98%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	9.225.000	9.087.000	99%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	9.450.000	9.081.400	96%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase penunjang kelancaran administrasi perkantoran	1.205.132.720	1.178.524.268	98%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	24.081.400	24.857.500	103%



Program/Kegiatan	Indikator	Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian (%)
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	730.604.495	730.464.000	100%
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	9.573.725	9.502.290	99%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	217.710.000	213.453.634	98%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	20.086.100	19.994.500	100%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	58.985.000	57.070.000	97%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	144.092.000	123.182.344	85%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase sarana dan prasarana aparatur yang menunjang kinerja pelayanan	303.495.900	284.639.780	94%
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	303.495.900	284.639.780	94%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase penunjang kelancaran administrasi perkantoran	327.150.000	304.990.360	93%
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.690.000	1.690.000	100%



Program/Kegiatan	Indikator	Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian (%)
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Peyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	214.700.000	197.615.976	92%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	110.760.000	105.684.384	95%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase sarana dan prasarana aparatur yang menunjang kinerja pelayanan	681.236.280	630.656.865	93%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	38.610.000	38.120.500	99%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	250.150.000	247.019.225	99%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	209.183.780	201.598.390	96%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	183.292.500	143.918.750	79%

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif dalam penyelenggaraan tugas-tugas keuangan pemerintah daerah dan menyiapkan pengkoordinasian perumusan kebijakan penyelenggaraan tugas dan fungsi

perangkat daerah di bidang anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan aset. Untuk menunjang tugas-tugas tersebut agar dapat terlaksana dengan baik, terus diupayakan peningkatan sumber daya manusia dan terpenuhinya sarana dan prasarana kerja yang memadai. Pengadaan sarana dan prasarana penunjangnya juga telah dianggarkan secara bertahap dan berjangka waktu sampai dengan selesai.

Tabel 3.12
Isu Strategis

No	Isu Strategis	Skor
1	Belum optimalnya layanan pemerintahan terutama dalam memberikan pelayanan publik yang lebih baik, cepat, mudah, murah dan bermutu	430
2	Belum tertatanya manajemen aset daerah	435
3	Belum optimalnya manajemen data dan informasi dalam seluruh proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan	380
4	Kurangnya koordinasi, kerjasama dan kemitraan antar perangkat daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mempercepat kemajuan desa dan kecamatan	355
5	Belum optimalnya kerjasama dan kemitraan pemerintah daerah dan swasta dalam pembangunan daerah	335



BAB IV
P E N U T U P

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun Anggaran 2022 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang yang telah disusun, selanjutnya diajukan kepada Bapak Bupati Jombang dan pihak lain yang berkepentingan untuk dijadikan bahan evaluasi.

Dengan menyadari adanya berbagai kendala yang dijumpai dalam pelaksanaannya tentu diupayakan pemecahannya serta dijadikan pemacu pada setiap tingkat dan tahapan pencapaian suatu keberhasilan, adapun upaya-upaya yang telah dilakukan adalah :

1. Peningkatan kualitas dan profesionalisme aparatur sesuai tuntutan kebutuhan pemenuhan SDM yang handal
2. Melakukan pembenahan terhadap dokumen-dokumen yang digunakan sebagai standar belanja barang/jasa
3. Peningkatan dan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana beserta fasilitas pelayanan lainnya sesuai dengan standar pelayanan secara bertahap
4. Optimalisasi pemberdayaan aset dan yang selanjutnya akan diarahkan pada Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jombang.

Kemudian atas berbagai perhatian dan fasilitasi dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja ini disampaikan banyak terima kasih.

Jombang, Februari 2024
**KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN JOMBANG**


MUHAMMAD NASHRULLOH, SE., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680202 199003 1 013